

# PEMETAAN KEBIJAKAN PRO RAKYAT MISKIN DI PROVINSI ACEH 2007-2011



Diterbitkan oleh:  
Bappeda Aceh  
Bekerja sama dengan UNICEF Indonesia



# Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dilakukan atas inisiatif Bappeda Aceh dengan dukungan pendanaan dari UNICEF Banda Aceh. Tim Peneliti terdiri atas Dr. Ir. Ema Alemina, MP. (team leader), didukung oleh M. Ilhamsyah Siregar, SE, MA (peneliti) dan Fakhruddin, SE, M.S.E (peneliti) serta Hidayati, S.Si, M.Si (peneliti). Tim peneliti sangat terbantu oleh arahan teknis dan substansi dari Herawati M. Daud, Social Policy Specialist, UNICEF Banda Aceh dan Hasrati, SE, MM (Kasubbid Pengembangan Kelembagaan Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda Aceh). Tim peneliti mendapatkan dukungan yang besar dari Ir. Iskandar, M.Sc. selaku Kepala Bappeda yang telah memberikan pengarahan baik selama proses pengumpulan data maupun pada proses penulisan laporan. Tim juga banyak mendapatkan dukungan dari Ir. Hamdani, M.Si. selaku Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP).

Tim penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Bappeda Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc. dan seluruh jajaran Bappeda Aceh yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada Tim sehingga dapat menjalankan tugas untuk menghasilkan laporan pemetaan ini dengan baik. Selama proses pengumpulan data, peneliti banyak mendapatkan masukan dan informasi dari berbagai SKPA seperti Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh, dan berbagai dinas terkait lainnya. Masukan tersebut sangat membantu proses pemetaan kebijakan. Selain dari SKPA, Tim juga terbantu oleh berbagai pihak yang terlibat baik di dalam proses Focus Group Discussion (FGD) maupun proses diskusi yang berkembang, seperti PuGAR Aceh, SuLOH Aceh, Regional Management Center PNPM MP, World Bank dan pihak lain yang terlibat.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga diucapkan kepada Prof. Dr. Raja Masbar, SE., M.Sc. (Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah) yang telah meriview laporan penelitian ini, sehingga laporan ini menjadi lebih baik dan terarah.

## Ucapan Terima Kasih

Laporan ini disusun untuk mengetahui kebijakan *pro-poor* yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh sejak tahun 2007 – 2011 yang telah sesuai dengan Inpres Nomor 3/2012. Laporan ini disusun oleh tim independen, maka temuan, kesimpulan dan rekomendasi tidak menggambarkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi UNICEF.

Akhirnya Tim berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh.

Tim Peneliti

# Daftar

## Isi

<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>V</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b>	<b>VI</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>X</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	8
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS</b>	<b>9</b>
2.1. Pengertian Pro-Poor	9
2.2. Klasifikasi Miskin	10
2.3. Proses Penyusunan Kebijakan Pro-Poor	11
2.4. Kerangka Pemikiran	13
<b>BAB III. METODE PEMETAAN KEBIJAKAN</b>	<b>15</b>
3.1. Metode Pemetaan	15
3.2. Teknik Pengumpulan Data	16
3.3. Pemetaan Kebijakan Pro-Poor	16
3.4. Sumber Informasi dan Data	16
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PRO-POOR DI ACEH, 2007-2011</b>	<b>17</b>
4.1. Gambaran Umum Kemiskinan di Aceh	17
4.2. Visi dan Isu-Isu Strategis Kebijakan Pemerintah Aceh	25
4.3. Program dan Kebijakan Pemerintah Aceh yang Pro-Poor	33
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>42</b>
5.1. Kesimpulan	42
5.2. Rekomendasi	44
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>48</b>

## Daftar Grafik

<b>GRAFIK 1.1.</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Aceh, 2007-2011	3
<b>GRAFIK 1.2.</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2007-2011	4
<b>GRAFIK 1.3.</b>	Garis Kemiskinan Aceh dan Indonesia Serta Pergerakannya Tahun 2007-2010	5
<b>GRAFIK 1.4.</b>	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Aceh dan Keparahan Kemiskinan (P2) Aceh dan Indonesia Tahun 2007-2011	6
<b>GRAFIK 1.5.</b>	Perbandingan Indeks Gini Indonesia dan Aceh Tahun 2007-2010	7
<b>GRAFIK 1.6.</b>	Perbandingan IPM Aceh dan Nasional Tahun 2004-2009	7
<b>GRAFIK 4.1.</b>	PDRB perkapita Non Migas Aceh Menggunakan Harga Berlaku dan Harga Konstan 2006–2010	18
<b>GRAFIK 4.2.</b>	Grafik Persentase Kemiskinan di Aceh Tahun 2006-2011	19
<b>GRAFIK 4.3.</b>	Pergerakan Garis Kemiskinan Aceh 2007-2010	20
<b>GRAFIK 4.4.</b>	IPM Aceh dan Indonesia 2006-2010	23
<b>GRAFIK 4.5.</b>	Share Sepuluh Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	35
<b>GRAFIK 4.6.</b>	Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi	37
<b>GRAFIK 4.7.</b>	Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar	38
<b>GRAFIK 4.8.</b>	Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	40
<b>GRAFIK 4.9.</b>	Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya	41

## Daftar Tabel

<b>TABEL 4.1.</b>	Jumlah, Persentase dan Perbandingan Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk di Aceh 2007-2010	19
<b>TABEL 4.2.</b>	Persentase dan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Aceh	21
<b>TABEL 4.3.</b>	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Aceh 007-2010	22
<b>TABEL 4.4.</b>	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh 2006-2010	23
<b>TABEL 4.5.</b>	Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan Pro-Poor Pada Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	26
<b>TABEL 4.6.</b>	Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan Pro-Poor Pada Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi	29
<b>TABEL 4.7.</b>	Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan Pro-Poor Pada Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar	31
<b>TABEL 4.8.</b>	Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan Pro-Poor Pada Prioritas Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	33
<b>TABEL 4.9.</b>	Ringkasan Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	34
<b>TABEL 4.10.</b>	Ringkasan Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi (2007-2011)	33
<b>TABEL 4.11.</b>	Ringkasan Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar (2007-2011)	37
<b>TABEL 4.12.</b>	Ringkasan Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan(2007-2011)	39
<b>TABEL 4.13.</b>	Ringkasan Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya (2007-2011)	40

# Executive Summary

**Poverty and underdevelopment remain complicated issues in Aceh.** Post conflict and disaster in Aceh urged the government of Aceh to keep prioritizing poverty issue in Aceh. Data from National Statistics Office (BPS) showed that Aceh had 0.894 million poor people in 2011, or 20.98 percent out of its total population. The number was lower compared to the statistic in 2007 whereas 1.1 million people were under poverty line or 26.65 percent out of total population in 2007.

**Compared to national statistic, Aceh poverty statistics were alarming.** In the period of 2007-2011, Aceh poverty line fell below national line. This fact supports the

statement that poverty is a difficult task for the government and it requires special attentions from the government. Severity and Poverty Gap Indexes in Aceh were more alarming, whereas the indexes for Aceh were worse than national indexes.

**However, the government enormous efforts to tackle poverty have shown better results in term of income disparity.** Looking at the income distribution disparity on the group of poors, the income disparity was better compared to national disparity. Nonetheless, those efforts must be continuously improved because the human development index for Aceh is still below national index. For

## Executive Summary

this reason, the government is required to understand the poverty issues and context better, learn the root of poverty and continue to design and implement *pro-poor* policies.

**Conceptually, pro-poor policy is the correct policy to tackle poverty** because of its focuses on improving the quality of life of the poorest directly. Nationally acceptable guidance on *pro-poor* policy was found in the President Instruction (INPRES) Number 3 / 2010, which is considered aligned with many *pro-poor* scholars' theories and thoughts. The National Government guided *pro-poor* policy focused on (1) Family-based approach; (2) Community empowerment based approach; and (3) micro and small business empowerment based approach. Scholars and experts agreed that *pro-poor* policy has some of the following criterias: (1) Specifically target the root of poverty or the main beneficiaries are poor groups; (2) improve the quality of life through the provision of basic and economic activity supporting infrastructures; and (3) reduce the cost of living for the group of poors.

**The government of Aceh in 2007-2011 had 7 (seven) development priorities** explicitly outlined in its Aceh Mid-Term Development Plan Document (RPJMA). Five out of these

seven priorities are considered *pro-poor* in its policy directions. Those priorities are: (1) Community Economic Empowerment, Employment Opportunity, and Poverty Alleviation; (2) Infrastructure and Energy to support investment; (3) Education Quality Improvement and Access to education; (4) Health Service Quality improvement and access to health; (5) Development of Islamic Sharia, Social and Culture.

**From the first priority, the government of Aceh implemented 38 programs from a total of 60 programs which are categorized pro-poor**, with total allocation of IDR 3.76 trillion with the highest annual spending, about IDR 1.25 trillion (in 2009) and the lowest annual spending in 2007, as much as IDR 155.36 billion. The highest spending program was for the Program of expanding the agricultural products, with total allocation of more than IDR 772 billion. From 38 programs, there were ten *pro-poor* programs which absorbed more than two third of total *pro-poor* fund allocation. Out of this top ten programs, the highest targeted groups were farmers with total allocation of more than IDR 1.66 trillion. However, only half of a trillion (IDR 500 billion) was directed to tackle the poverty reduction issue in the group of fishermen in the coastal areas of Aceh. One



## Executive Summary

can note that this priority had many alignments with Inpres Number 3 / 2010.

**The government implemented 14 pro-poor programs out of total 35 programs in the second priority**, with total allocation of almost IDR 8.5 trillion. The highest annual spending was recorded in 2009, with almost IDR 2.79 trillion spent on that year, and the lowest was in 2007, with more than Rp 308.05 billion was spent. The highest spending program was for Road and Bridges Construction absorbed more than IDR 3.3 trillion (39.03 percent). Including the spending for roads and bridges, top four highest absorbers took more than IDR 6.6 trillion or about 78.74 percent; while the spending for building village infrastructures was about IDR 1.17 trillion, or almost 14 percent out of total *pro-poor* spending in this priority. Building irrigation took almost the same, absorbing IDR 1.09 trillion or almost 13 percent.

**12 programs, out of 15 total programs, were considered pro-poor in the third priority**, absorbing almost IDR 3.5 trillion. The highest annual spending was in 2009, recorded IDR 1.12 trillion was spent and the lowest was IDR 153.68 billion. The highest absorber program was the Basic Education (Pendidikan Dasar), taking more than IDR 1.58 trillion. This program

took almost 46 percent out of total *pro-poor* allocation. Top four absorbers took more than 85 percent. The highest spending program was for high school education, infrastructure for Islamic boarding schools (well-known as "dayah") and early childhood education which took almost IDR 3 trillion.

**From the fourth priority, the government implemented 14 pro-poor programs out of 18 total programs**. Total funds allocation was more than IDR 1.8 trillion. The highest annual spending was in 2011, with more than IDR 633 billion spent. The lowest was in 2007, with more than IDR 64 billion spent. The highest spending program was the Partnership for Improving the quality of health services, the umbrella for the famous Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). This program took out more than IDR 661 billion, shared 36.53 percent out of total *pro-poor* allocation or spending in this priority.

**From the fifth priority, the government implemented 8 pro-poor programs out of 25 total programs**. Total allocation for *pro-poor* programs were more than IDR 398 billion. The highest annual spending was in 2009, with more than IDR 127 billion spent. The lowest was in 2007, with more than IDR 53 billion spent. The highest spending program was

## Executive Summary

Social Welfare rehabilitation Services. This program took out around IDR 226 billion, shared 56.56 percent out of total *pro-poor* allocation or spending in this priority.

**Even though the results from this analysis show that the government has been positively sensitive in responding to the poverty issues**, there are a few points to discuss. First, poverty issue is a complex issue. The complexity is most likely deterrent to achieve the optimum results from poverty alleviation programs. It means the government needs to be crystal-clear on expressing their policy statements. Poverty alleviation programs must be as comprehensive and participative as possible. Second, despite explicitly prioritizing on *pro-poor*, priority interpretation on programs and activities must be aligned to ensure higher correlation to the expressed priorities and policy objectives. Poverty alleviations are usually cross-sectional issues, yet coordination and evaluation must be seriously implemented. Third, poverty alleviations are long and time consuming process and usually very expensive. In anticipation, the government needs to optimize the potential revenue sources, improve the spending efficiency and stimulate economic growth. Some possible road maps, among others, are: optimize own-source

revenues, focus on spending efficiency and stimulate investment. Finally, the aspects of continuity and sustainability are keys for success in poverty alleviations. In summary, the government needs to clearly and explicitly reflect these continuity and sustainability aspects in the longer term development planning (RPJPA).

# Ringkasan Eksekutif

**Kemiskinan dan keterbelakangan masih merupakan isu pembangunan ekonomi di Aceh.** Setelah masa konflik dan bencana yang melanda Aceh, persoalan kemiskinan masih harus menjadi prioritas penting Pemerintah Aceh. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Aceh tahun 2010 sebesar 0,861 juta jiwa atau 20,98 persen dari total penduduk Aceh. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 di mana jumlah penduduk miskin mencapai 1,1 juta jiwa atau sebesar 26,65 persen dari total penduduk Aceh.

**Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional,** statistik kemiskinan Aceh masih jauh dari angka nasional. Dalam periode penelitian, terlihat bahwa sejak 2007-2011, garis kemiskinan Aceh selalu berada di bawah garis kemiskinan Indonesia secara nasional. Statistik ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Aceh merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan perhatian lebih serius dari Pemerintah Aceh. Tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Aceh juga cukup mengkhawatirkan. Dalam periode penelitian, indeks keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di Aceh masih jauh dari indeks yang sama secara nasional.

## Ringkasan Eksekutif

### **Upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kemiskinan di Aceh telah memberikan perbaikan pada disparitas pendapatan.**

Jika dilihat dari indikasi ketimpangan distribusi pendapatan pada kelompok miskin di Aceh, distribusi pendapatan di kelompok miskin di Aceh masih lebih baik dari angka nasional. Namun, upaya tersebut masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan, karena secara kualitas, ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM), angka IPM Aceh masih jauh di bawah IPM Nasional. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Aceh untuk selalu mengetahui kondisi aktual dari masyarakat miskin, mempelajari akar persoalan kemiskinan di Aceh dan mengupayakan perbaikan-perbaikan kebijakan *pro-poor* yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh.

**Secara konseptual, kebijakan pro-poor merupakan jawaban paling tepat untuk mengatasi kemiskinan** karena penekanannya pada upaya-upaya untuk secara langsung meningkatkan taraf hidup kelompok miskin. Secara nasional, rujukan penting tentang kebijakan *pro-poor* dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, yang secara teoretik sangat sesuai dengan pandangan-pandangan para pakar dan pengalaman di berbagai negara tentang *pro-poor*. Kebijakan

pembangunan pemerintah dikategorikan *pro-poor* jika dilakukan melalui tiga fokus, yaitu: (1) Fokus pada pemberdayaan berbasis keluarga; (2) Fokus pada pendekatan pemberdayaan berbasis pemberdayaan masyarakat dan (3) Fokus pendekatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Berbagai ahli menyatakan bahwa kebijakan *pro-poor* memiliki karakteristik penting, antara lain: (1) kebijakan/program yang spesifik menargetkan penyebab-penyebab kemiskinan atau penerima manfaat utamanya adalah kelompok miskin; (2) kebijakan/program yang meningkatkan kondisi kehidupan kelompok miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian; (3) kebijakan/program yang menargetkan penurunan biaya hidup bagi kelompok miskin.

### **Pemerintah Aceh selama tahun 2007-2011 memiliki 7 (tujuh) prioritas pembangunan**

yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh. Dari 7 (tujuh) prioritas tersebut, 5 di antaranya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan *pro-poor*. Keempat prioritas itu adalah: (1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan; (2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya

## Ringkasan Eksekutif

energi pendukung investasi; (3) Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar; (4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan; (5) Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya.

**Dari prioritas pertama, Pemerintah Aceh melaksanakan 38 program yang dikategorikan Pro-Poor dari total 60 program yang dilaksanakan**, dengan alokasi Rp 3.76 triliun dengan total pengeluaran tahunan terbesar sekitar Rp 1.25 triliun (terjadi tahun 2009) dan total pengeluaran tahunan terendah tercatat sebesar Rp 155.36 miliar (terjadi pada tahun 2007). Program dengan jumlah pengeluaran terbesar adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan alokasi lebih dari Rp 772 miliar. Dari 38 program, terdapat 10 (sepuluh) program *pro-poor* yang menyerap lebih 2/3 alokasi anggaran *pro-poor*. Dari 10 besar pengeluaran ini, 4 (empat) program menargetkan pengentasan kemiskinan pada kelompok petani/pekebun dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 1.66 triliun. Alokasi sebesar hampir setengah triliun digunakan untuk mengatasi kemiskinan pada kelompok nelayan. Pada prioritas ini, Pemerintah Aceh memiliki banyak keselarasan dengan arahan dari Inpres Nomor 3/2010.

**Dari prioritas kedua, Pemerintah Aceh melaksanakan 14 program yang dikategorikan Pro-Poor dari total 35 program yang dijalankan**, dengan alokasi sebesar hampir Rp 8.5 triliun. Total pengeluaran tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu hampir Rp 2.79 triliun, dan total pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2007, yaitu hampir Rp 308.05 miliar. Program dengan pengeluaran terbesar adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang menyerap lebih dari Rp 3.3 triliun (39.03 persen). Pengeluaran untuk pembangunan jalan dan jembatan menyerap lebih dari 1/3 bagian dari total pengeluaran di prioritas ini. Empat program besar menyerap pengeluaran tertinggi, dengan angka penyerapan pengeluaran lebih dari Rp 6.6 triliun atau 78.74 persen. Pengeluaran untuk membangun infrastruktur pedesaan mencapai Rp 1.17 triliun, atau hampir 14 persen dari total pengeluaran *pro-poor* pada prioritas ini. Jumlah pengeluaran dan share yang hampir sama nilainya diserap oleh program pembangunan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, yaitu senilai Rp 1.09 triliun atau hampir 13 persen dari total pengeluaran *pro-poor*.

## Ringkasan Eksekutif

**Dari prioritas ketiga, Pemerintah Aceh melaksanakan 12 program yang dikategorikan Pro-Poor dari total 15 program yang dilaksanakan**, menyerap hampir Rp 3.5 triliun. Pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2009, yaitu hampir Rp 1.12 triliun dan pengeluaran paling rendah terjadi pada tahun 2007, yang menyerap lebih dari Rp 153.68 miliar. Program *pro-poor* dengan alokasi terbanyak adalah Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun yang menyerap pengeluaran lebih dari Rp 1.58 triliun. Share program ini dari total pengeluaran *pro-poor* adalah lebih dari 45.73 persen, atau hampir separuh dari total pengeluaran *pro-poor*. empat program yang menyerap anggaran paling banyak, menyerap anggaran lebih dari 85 persen dari total anggaran *pro-poor* pada prioritas ketiga. Pengeluaran paling besar dikeluarkan untuk program wajib belajar 9 tahun, diikuti program pendidikan menengah, pembangunan sarana dan prasarana dayah, dan program pendidikan anak usia dini. Keempat program ini menyerap anggaran hampir Rp 3 triliun.

**Dari prioritas keempat, Pemerintah Aceh melaksanakan 14 program yang dikategorikan Pro-Poor dari total 18 program yang dilaksanakan**. Serapan pengeluarannya mencapai lebih dari Rp 1.8 triliun. Pengeluaran

tahunan terbesar terjadi pada tahun 2011, dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 633 miliar. Sedangkan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2007, dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 64 miliar. Dilihat dari besaran anggaran yang diserap oleh masing-masing program, maka program yang menyerap anggaran paling besar adalah program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, yang merupakan payung program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program ini menyerap lebih dari Rp 661 miliar, dengan share sebesar 36.53 persen dari total pengeluaran *pro-poor* di prioritas ini.

**Dari prioritas kelima, Pemerintah Aceh menjalankan 8 program yang dikategorikan pro-poor dari total 25 program yang dijalankan**. Serapan pengeluarannya mencapai Rp 398 miliar dengan pengeluaran terbesar terjadi tahun 2009, di mana sebesar Rp 127 billion telah dibelanjakan. Sedangkan pengeluaran terendah terjadi tahun 2007 dengan pengeluaran lebih dari Rp 53 miliar. Program dengan pengeluaran terbesar adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program ini menyerap sekitar Rp 226 miliar, kira-kira 56.56 persen dari keseluruhan pengeluaran *pro-poor* di prioritas kelima ini.

## Ringkasan Eksekutif

**Meskipun dari analisis kebijakan pro-poor menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah cukup sensitif dalam menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan**, ada beberapa hal yang penting untuk tetap mendapatkan perhatian penting dari Pemerintah Aceh. Pertama, persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Kompleksitas persoalan kemiskinan seringkali menggagalkan program pengentasan kemiskinan yang digagas pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Aceh harus memahami persoalan kemiskinan secara lebih jernih. Program-program pengentasan kemiskinan harus lebih komprehensif dan partisipatif. Kedua, meskipun secara eksplisit Pemerintah telah menetapkan prioritas yang condong pro-rakyat, penerjemahan prioritas menjadi program dan kegiatan harus lebih dikontrol untuk memastikan lebih tingginya korelasi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Pengentasan kemiskinan seringkali memiliki isu lintas-sektor, dan untuk itu, peran koordinasi dan evaluasi harus didorong pelaksanaannya secara optimal. Ketiga, pengentasan kemiskinan adalah proses yang sangat panjang, berbiaya mahal dan memakan waktu yang lama. Untuk itu, Pemerintah Aceh harus mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatannya, mengefisienkan alokasi dan pemanfaatan pendapatannya, dan mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: menggali sumber pendapatan Aceh, mengupayakan efisiensi anggaran, dan menciptakan serta mendorong investasi baik investasi swasta dan pemerintah, dalam dan luar negeri. Keempat, aspek kontinuitas dan kebersinambungan merupakan kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penting pula bagi Pemerintah Aceh untuk secara jernih dan eksplisit mencerminkan kesinambungan dan kontinuitas pengentasan kemiskinan dalam perencanaan jangka panjangnya.

# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan selalu menjadi persoalan pembangunan dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku pembangunan dan pengambil kebijakan. Pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan ekonomi sering menghadapi pilihan dilematis antara kemajuan pertumbuhan dan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan sepatutnya ditempatkan sebagai pusat perhatian (*center of objective*) dalam pembangunan ekonomi.

Menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai tujuan dan cita-cita pembangunan

ekonomi membutuhkan strategi pembangunan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih memusatkan perhatian kepada kelompok-kelompok miskin. Strategi pembangunan tersebut harus didesain baik pada tingkat nasional maupun pada tingkatan pemerintahan di bawahnya, dalam jangka waktu (*timeframe*) yang cukup panjang dan diimplementasikan dengan baik.

Dalam berbagai pengalaman pengentasan kemiskinan dunia, berbagai fakta dan bukti empiris menunjukkan bahwa paradigma pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan ekonomi terlihat tidak cukup akurat dan bertenaga untuk mengentaskan



kemiskinan. Mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti yang dilakukan oleh berbagai negara pada dekade 1950-an dan 1960-an, yang berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan memberi dampak pada pengurangan angka kemiskinan melalui proses *trickledown effect*, ternyata tidak memberi dampak yang cukup berarti bagi pengurangan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang dikejar melalui investasi (baik investasi dalam negeri maupun asing, investasi swasta maupun pemerintahan) secara eksplisit terlihat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun *trickledown effect* yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan upah, ternyata tidak cukup kuat untuk memperbaiki tingkat kemiskinan. Paradigma yang dikenal dengan "*pro-growth*" yang fokus pada pertumbuhan (*growth*) mengalami evolusi menjadi paradigma pembangunan baru yang lebih "*pro-poor*".

Kebijakan pembangunan ekonomi yang "*pro-poor*" awalnya didasari pada kegagalan pendekatan *pro-growth* dan diinisiasi untuk menyediakan perlindungan sosial (*social safety net*) bagi kelompok miskin yang tidak terjangkau melalui kebijakan pro-pertumbuhan atau kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam proses pembangunan ekonomi. Secara makro, kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada proses stabilisasi (sering dikenal sebagai kebijakan stabilisasi menuju pertumbuhan) dengan menargetkan kelompok miskin dan marginal agar dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi dapat diperkecil. Pendekatan ini

pun mengalami kegagalan karena persebaran pertumbuhan ekonomi juga tidak merata dan stabil.

Karena itu, muncul kesadaran untuk secara eksplisit menargetkan pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin sebagai tujuan utama dari kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan model ini dikenal sebagai kebijakan *pro-poor*, yang lebih menyentuh aspek penyebab kemiskinan di berbagai level masyarakat.

Meskipun mengejar pertumbuhan ekonomi saja dirasakan gagal, kebijakan *pro-poor* tanpa diikuti dengan memacu pertumbuhan ekonomi juga dianggap tidak bijaksana. Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi adalah aspek penting dalam pengentasan kemiskinan, karena tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengentasan kemiskinan tidak akan dapat berjalan berkesinambungan. Pembiayaan untuk mengentaskan kemiskinan juga bersumber dari pertumbuhan ekonomi, sehingga bentuk kebijakan ekonomi yang diambil harus merupakan kombinasi antara mengejar pertumbuhan dan secara eksplisit menargetkan kelompok miskin.

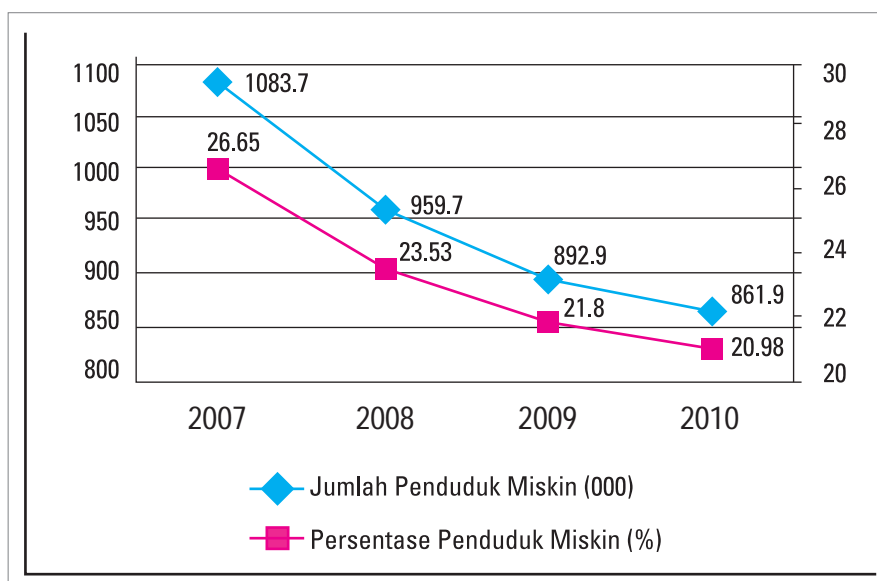
Dengan bahasa lain, pertumbuhan ekonomi harus cukup tinggi tingkat pertumbuhannya untuk meningkatkan kondisi kemiskinan secara absolut, dan untuk memaksimalkan dampak kebijakan terhadap kemiskinan, mengejar pertumbuhan ekonomi juga harus mampu meningkatkan kondisi kemiskinan secara relatif.

Pada konteks Indonesia dan Aceh, kemiskinan masih merupakan persoalan besar yang harus ditangani melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 31.02 juta jiwa (13.33 persen dari total penduduk di Indonesia, berkurang 1.51 juta dibandingkan dengan angka penduduk miskin pada periode yang sama tahun 2009. Pada tingkat provinsi, penduduk miskin sebelum tsunami tercatat sebanyak 1.7 juta jiwa (lebih 40 persen dari total penduduk), dan jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 48 persen pasca tsunami. Data yang berbeda ditemukan dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2008, di mana pada tahun 2004, penduduk miskin di Aceh tercatat sebesar 28.4 persen, sedangkan tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 32.6 persen dan 26.5 persen. Angka kemiskinan terlihat meningkat tahun 2005, sebagai dampak langsung akibat tsunami

dan membaik tahun 2006 akibat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta membaiknya kondisi keamanan di Aceh. Meskipun data berbeda, namun informasi yang tersedia menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang rumit.

Dalam tahun-tahun berikutnya, seiring dengan peningkatan kemampuan daerah, jumlah penduduk miskin di Aceh semakin berkurang baik dari sisi jumlah maupun persentase terhadap total jumlah penduduk Aceh. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Aceh tahun 2011 sebesar 0,894 juta jiwa atau 19,57 persen dari total penduduk Aceh. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 1,1 jiwa atau sebesar 26,65 persen dari total penduduk Aceh (lihat Grafik berikut ini).

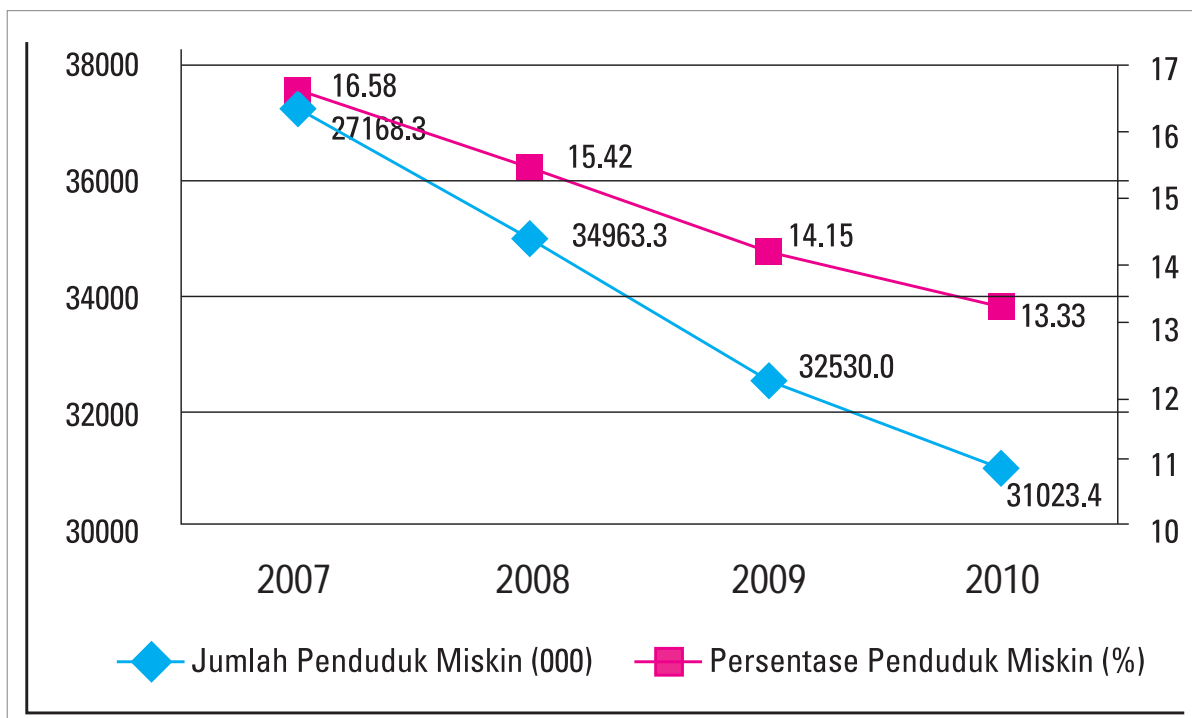
**Grafik 1.1.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Aceh, 2010



Penurunan jumlah penduduk miskin Aceh sejalan dengan tren penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, bahkan dalam periode yang sama persentase penurunan tingkat kemiskinan di Aceh lebih besar dari angka rata-rata nasional. Namun, jika dibandingkan dengan data nasional, tingkat kemiskinan Aceh masih jauh di atas angka rata-rata nasional. Pada tahun 2007 penduduk miskin di Indonesia mencapai 16,58 persen dan pada tahun 2010 turun menjadi 13,33 persen atau mengalami penurunan lebih dari 3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan tingkat kemiskinan masih harus berlanjut walau beberapa tahun terakhir keberhasilan yang dicapai pemerintah Aceh cukup membanggakan.

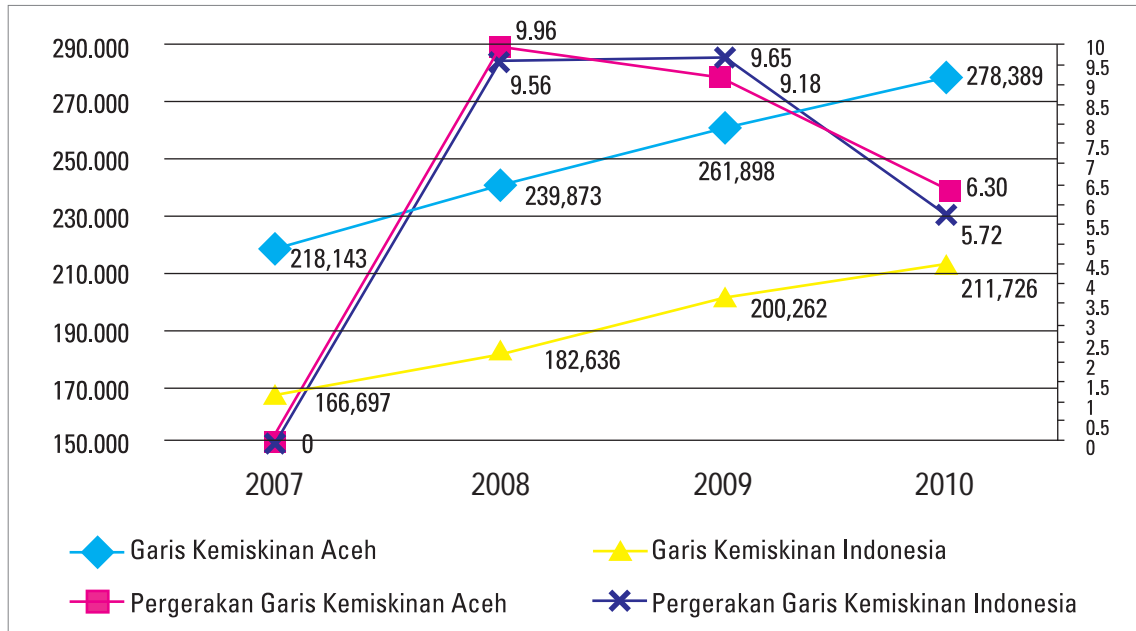
Lebih lanjut, perubahan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, seseorang akan tergolong sebagai penduduk miskin jika memiliki pendapatan per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Selama Maret 2007- Maret 2008, garis kemiskinan naik sebesar 9,96 persen atau naik dari Rp 218.143,- per kapita pada Maret 2007 menjadi Rp 239.873,- per kapita pada Maret 2008. Periode berikutnya (Kondisi Maret 2009) garis kemiskinan naik sebesar 9,18 persen atau menjadi Rp 261.898,-, dan pada Tahun 2010 (Kondisi bulan Maret) Garis kemiskinan naik menjadi Rp 278.389,- atau meningkat sebesar 6,30 persen.

Grafik 1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2010



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.3. Garis Kemiskinan Aceh dan Indonesia serta Pergerakannya Tahun 2010



Sumber: BPS (data diolah)

Kenaikan garis kemiskinan tidak menyebabkan penambahan jumlah penduduk miskin karena pada saat yang bersamaan terjadi kenaikan pendapatan per kapita (berdasarkan PDRB Non migas) penduduk Aceh.

Garis kemiskinan Aceh hingga tahun 2010 masih sangat jauh di atas angka rata-rata garis kemiskinan Indonesia. Hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya jumlah penduduk miskin di Aceh. Dalam periode yang sama, pergerakan garis kemiskinan Aceh bergerak searah dengan pergerakan garis kemiskinan Indonesia yang berarti terjadi peningkatan batas garis kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2007, batas garis kemiskinan Indonesia berada pada Rp 166.697,- dan dalam tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2010 batas garis kemiskinan berada pada level Rp 211.726,-. Kondisi ini

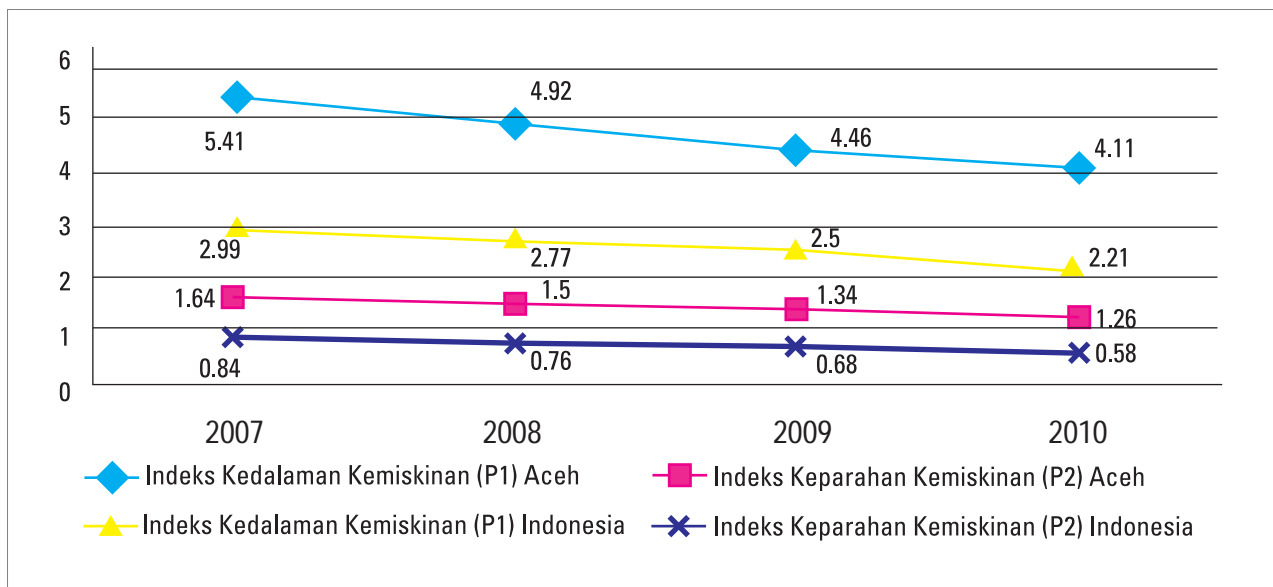
menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Aceh membutuhkan kerja keras dan pendekatan khusus yang lebih efektif dari program reguler yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Aceh.

Persoalan kemiskinan tidak hanya berupa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dalam pembahasan kemiskinan sangat penting untuk mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dalam rentang waktu Maret 2007 –Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Aceh mengalami penurunan. Periode Maret 2007-Maret 2008 Indeks Kedalaman kemiskinan menurun dari 5,41 persen menjadi

4,92 persen dan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 1,64 menjadi 1,50 persen. Periode berikutnya (Maret 2008-Maret 2009) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan kemiskinan turun menjadi 4,46 persen dan 1,34 persen. Demikian juga periode berikutnya (Maret 2009-Maret 2010) kedua indeks tersebut juga mengalami penurunan dimana Indeks Kedalaman kemiskinan menjadi 4,11 persen dan Indeks Keparahan Kemiskinan 1,26 persen. Penurunan kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

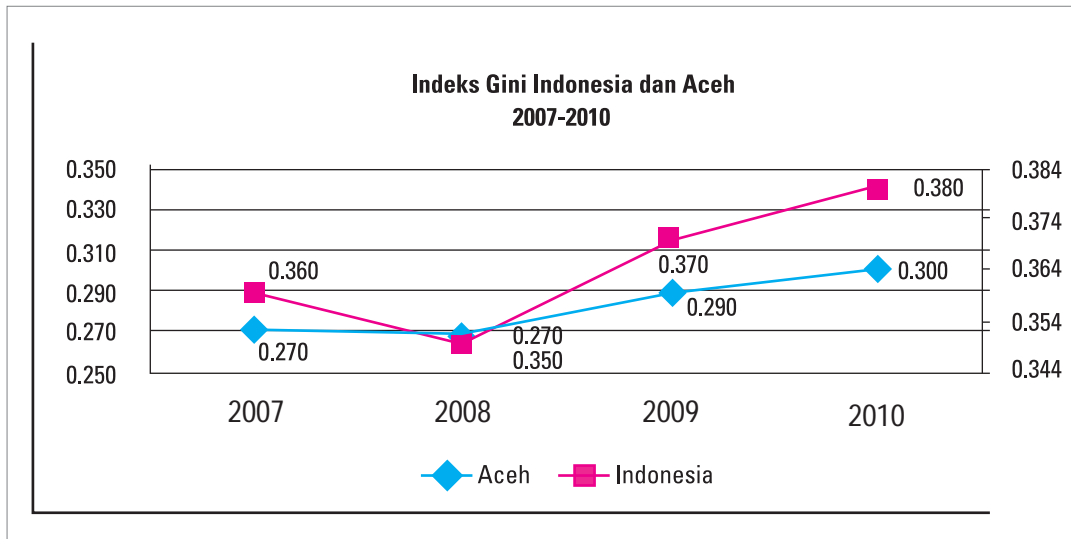
Jika membandingkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Aceh dengan angka indeks nasional, terlihat bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Aceh **masih jauh** di atas angka rata-rata nasional. Hal ini memberi makna yang jelas bahwa walaupun tingkat pengeluaran rata-rata penduduk miskin Aceh makin mendekati garis kemiskinan namun gap antara rata-rata pengeluaran dan garis kemiskinan masih di atas rata-rata pengeluaran penduduk miskin Indonesia. Lebih lanjut, ketimpangan pengeluaran penduduk miskin Aceh juga masih berada di atas rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin Indonesia.

**Grafik 1.4.** Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Aceh dan Indonesia Tahun 2010



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.5. Perbandingan Indeks Gini Indonesia dan Aceh Tahun 2010

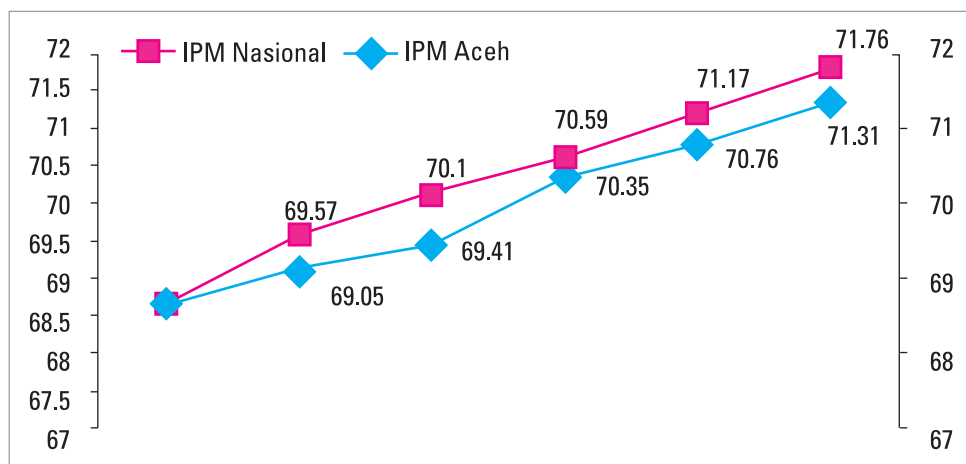


Sumber: BPS (data diolah)  
 Note: Angka Indeks Gini untuk Aceh dan Indonesia tahun 2011 baru akan tersedia pada kuartal ke III tahun 2012.

Walau ketimpangan pendapatan penduduk miskin Aceh lebih tinggi dari ketimpangan pendapatan penduduk miskin nasional, namun distribusi pendapatan penduduk di Aceh masih lebih baik dibandingkan dengan distribusi pendapatan nasional. Dengan demikian ketimpangan pendapatan masyarakat Aceh justru lebih kecil dibandingkan dengan kondisi nasional. Hal ini merupakan indikasi

bahwa upaya pemerintah Aceh melakukan pemerataan tingkat pendapatan penduduk telah berjalan cukup baik. Bila upaya meningkatkan pemerataan dan peningkatan pendapatan penduduk berlanjut dengan baik maka dengan sendirinya jumlah penduduk miskin di Aceh akan berkurang dan kesejahteraan penduduk akan meningkat.

Grafik 1.6. Perbandingan IPM Aceh dan Nasional Tahun 2004 - 2009



Sumber: BPS (data diolah)

Sejalan dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan serta membaiknya distribusi pendapatan di Aceh, terjadi kenaikan standar hidup penduduk Aceh.

Hal ini tergambar melalui kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dalam periode yang sama. IPM Aceh pada tahun 2004 berada pada posisi 68,7 persen dan meningkat menjadi 71,36 persen pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 3,06 persen. Namun demikian, dalam periode yang sama, IPM Aceh masih di bawah IPM nasional yang berarti standar hidup penduduk Aceh masih di bawah standar hidup nasional.

Dengan demikian dibutuhkan sebuah evaluasi mendalam terhadap proses pembangunan yang selama ini berjalan baik pada level nasional maupun level provinsi. Evaluasi mendalam diharapkan mampu menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan baik pada tingkat nasional dan provinsi, dalam memahami bagaimana kebijakan yang diambil yang secara langsung dirasakan terkait pada kelompok miskin. Evaluasi tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah peta kebijakan dari seluruh kebijakan yang telah diambil di Aceh untuk mengentaskan kemiskinan, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan baru dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat. Dari evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat melahirkan berbagai rumusana kebijakan (baik baru maupun dalam rangka perbaikan kebijakan yang telah ada) yang dapat menjadi katalisator dalam pengentasan kemiskinan di Aceh.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Apakah kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh sejak 2007 – 2011 telah *pro-poor*
- b. Apakah kebijakan *pro poor* yang ditetapkan Pemerintah telah sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh sejak 2007 – 2011 yang tergolong kedalam kebijakan *pro-poor*;
- b. Untuk mengetahui kebijakan *pro-poor* yang telah sesuai dengan Inpres Nomor 3 tahun 2010.

## 1.4. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh selama kurun waktu 2007 – 2011 yang dikategorikan sebagai kebijakan yang *pro-poor*. Pemetaan kebijakan *pro-poor* dilakukan dengan kriteria yang diajukan oleh Korayem, Klasen dan Duclos.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten/kota atau yang diambil oleh pemerintah pusat tidak dipetakan, karena batasan ruang lingkup ini.

# Bab 2

## Tinjauan Teoritis

### 2.1. Pengertian Pro-Poor

Mirzakhanyan dkk (2005) mendefinisikan kebijakan *pro-poor* sebagai kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah yang mengadopsi pendekatan pembangunan manusia (*human development*) yang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat sumberdaya modal manusia (*human capital strengthening*) dan mengembangkan kesempatan (*expanding opportunities*) dari kelompok miskin. Definisi lain dari kebijakan *pro-poor* dikembangkan oleh Korayem (2004) dalam kajiannya tentang kebijakan *pro-poor* di Mesir menjelaskan bahwa kebijakan *pro-poor* dapat dibagi

menjadi tiga jenis menurut target dan jenis intervensinya kepada kelompok miskin: (1) kebijakan/program yang spesifik menargetkan penyebab-penyebab kemiskinan atau penerima manfaat utamanya adalah kelompok miskin; (2) kebijakan/program yang meningkatkan kondisi kehidupan kelompok miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian; (3) kebijakan/program yang menargetkan penurunan biaya hidup bagi kelompok miskin.

El Ouardighi dan Somun-Kapetanovic (2010) dalam kajiannya tentang kebijakan *pro-poor* di negara-negara Balkan mendefinisikan dan memetakan kebijakan *pro-poor* dengan



meninjau berbagai pandangan tentang kebijakan *pro-poor*. Pertama, kebijakan *pro-poor* adalah kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan. Definisi ini dianggap sangat lemah, karena jika pertumbuhan ekonomi diikuti dengan meningkatnya ketidakmerataan, maka pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan *gap* kemiskinan yang semakin dalam.

Kedua, seperti yang didukung oleh Klasen (2008) dan Duclos (2009), kebijakan yang didorong melalui pertumbuhan ekonomi digolongkan *pro-poor* jika pertumbuhan ekonomi menimbulkan pertumbuhan rata-rata pendapatan kelompok miskin yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan kelompok yang bukan miskin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di negara-negara Balkan (Albania, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Macedonia dan Serbia Montenegro) yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik selama kurun waktu 1989-2005, ternyata tidak diikuti dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan kelompok miskin yang tinggi. Sehingga kebijakan negara-negara tersebut bukan kebijakan *pro-poor*.

Penelitian yang serupa pernah dilakukan untuk melihat kebijakan *pro-poor* di Mexico. Araar dkk (2009) menggunakan definisi yang didukung oleh Duclos dan Krasen, bahwa kebijakan ekonomi yang mengejar pertumbuhan digolongkan *pro-poor* jika pertumbuhan ekonomi menimbulkan pertumbuhan rata-rata pendapatan kelompok miskin yang lebih

besar dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan kelompok yang bukan miskin. Araar dkk menemukan bahwa kebijakan pemerintah Mexico tahun 2004 yang mengejar pertumbuhan di Mexico digolongkan "anti-poor", sedangkan kebijakan Mexico relatif *pro-poor* dalam kurun 1992 dan 2004.

## 2.2. Klasifikasi Miskin

Secara umum Indonesia memakai standar pengukuran kemiskinan yang dikembangkan dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuaian dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.

Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976. Sayogyo dan Sam F. Poli dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita.

Konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun (BPS, 1994). Sebaliknya Bank Dunia menggunakan

standard mata uang dollar Amerika Serikat, yaitu untuk dekade 1980, standar pengeluaran untuk makanan adalah 50 dolar AS untuk pedesaan dan 75 dolar AS untuk per kapita per tahun (berdasarkan kurs dasar dollar 126 terhadap rupiah pada tahun 1971). BPS dalam mengadopsi ukuran dari Bank Dunia melakukan penyesuaian dengan pola dasar konsumsi pada tahun 1971, dan kemudian disesuaikan dengan kenaikan harga (inflasi) dari bahan makanan pokok. Penyebaran kemiskinan, karakteristik demografis, karakteristik pekerjaan, sumber penghasilan, dan pola konsumsi penduduk miskin dan kaya.

Ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara-negara dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris kadang-kadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan, terutama saat membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. *Sen Poverty Index* (SPI) yang merupakan formula yang dipergunakan untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tidak mampu mengukur tingkat kesejahteraan. SPI yang lebih mendasarkan pada *poverty head account ratio* dan ini yang diambil dari penyebaran pendapatan per kapita (koefisien Gini) ternyata hanya mengukur kemiskinan dari tingkat pendapatan.

Anand dan Kanbur (1993) mengusulkan pola pengukuran kemiskinan dengan memasukan variabel variabel non-keuangan (non financial

variables), seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, fasilitas kesehatan yang luas dan murah, kesempatan kerja yang tinggi, angka kematian balita dan ibu yang melahirkan, tingkat kemungkinan hidup, sistem perumahan sarana kesehatan umum, listrik dan lain lain. Malcolm Gillis dalam bukunya "*Economics of Development*" (2001) mencantumkan faktor tersebut sebagai *basic human needs and Social Indicators* atau indikator-indikator kebutuhan dasar dan sosial manusia dalam penghitungan kemiskinan.

### 2.3. Proses Penyusunan Kebijakan Pro-Poor

Proses-proses penyusunan dan pengambilan kebijakan merupakan kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di suatu negara. Prosesnya dimulai dari proses penilaian persoalan yang dihadapi dan membutuhkan intervensi kebijakan, strategi yang dibutuhkan dan pernyataan tentang tujuan, sasaran dan hasil yang ingin dicapai, pendefinisian kebutuhan dan prioritas-prioritas, serta target yang ingin dicapai. Proses kebijakan yang *pro-poor* dapat dengan sederhana dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan kelompok miskin, maupun kebijakan yang, meskipun tidak melibatkan kelompok miskin, namun secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Untuk itu, menilai kebijakan *pro-poor* harus dimulai dari penilaian tentang kualitas pemahaman akan akar persoalan penyebab kemiskinan. Penilaian tersebut dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman konteks kemiskinan yang lebih komprehensif agar perumusan kebijakan yang

akan dihasilkan dapat berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi terhadap akar persoalan penyebab kemiskinan.

Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dari perencanaan untuk memastikan membaiknya fokus dari proses kebijakan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan. Sayangnya semakin membaik proses memahami akar persoalan kemiskinan, semakin kompleks pula persoalan pemilihan kebijakannya. Tantangannya semakin besar karena pemilihan kebijakan dan implementasinya harus selalu relevan terhadap konteks persoalan kemiskinan.

Yang sering terlupakan adalah untuk menjaga relevansi antara hasil kebijakan dengan aktifitas-aktifitas pembangunan ekonomi. Salah satu studi dari Bank Dunia mengkritik kelemahan dari kebijakan *pro-poor* yang lazim dilakukan adalah lemahnya keterkaitan antara belanja publik (representasi dari aktifitas pembangunan ekonomi) dengan hasil akhir dari kebijakan, yaitu kondisi absolute kemiskinan (Paternostro et al., 2005:3).

Partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan kebijakan sering dianggap sebagai fitur utama dari kebijakan *pro-poor*. Hal ini dapat meningkatkan relevansi, efektifitas, efisiensi dan kesinambungan dari kebijakan *pro-poor*. Hal ini dapat pula meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari proses kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi rencana tindakan aksi.

Kebijakan pemerintah partisipatif yang dilakukan secara sistematis akan mampu mengentaskan kemiskinan, di mana selama ini hal tersebut menjadi salah satu kelemahan proses pembangunan dalam jangka panjang. Kebijakan partisipatif yang diarahkan untuk menciptakan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan menyebabkan upaya pemberantasan kemiskinan berjalan efektif sehingga mampu menekan tingkat kemiskinan.

Lebih lanjut, kebijakan pembangunan partisipatif akan menjadi katalisator dalam pencapaian sasaran pembangunan (Todaro, 2006: 26 - 27) yaitu: 1. Peningkatan penyediaan kebutuhan pokok seperti pangan, papan kesehatan dan lingkungan; 2. Mengangkat taraf hidup melalui peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan lebih memperhatikan sisi-sisi budaya dan kemanusiaan; dan 3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dengan mengurangi menghilangkan sifat ketergantungan, tidak hanya pada orang lain melainkan juga pada hal-hal penting lainnya seperti menghilangkan ketergantungan pada kebodohan dan penderitaan.

Menurut Gaulet (dalam Todaro; 2006 : 26-27) ada tiga nilai hakiki pembangunan yaitu perbaikan tingkat hidup; peningkatan harga diri dan peningkatan kebebasan. Jika kondisi ketiga hal tersebut sangat buruk (rendahnya taraf hidup seseorang maupun sebuah kelompok masyarakat, rendahnya harga diri baik secara

individu maupun sebagai sebuah bangsa serta minimnya kebebasan dalam membuat pilihan) merupakan indikasi berlangsungnya sebuah keterbelakangan.

Todaro mengembangkan konsep Gaulet dengan menyatakan bahwa sasaran pembangunan setidaknya harus mencakup:

1. Peningkatan penyediaan kebutuhan pokok seperti pangan, papan kesehatan dan lingkungan;
2. Mengangkat taraf hidup melalui peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan lebih memperhatikan sisi-sisi budaya dan kemanusiaan; dan
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dengan mengurangi menghilangkan sifat ketergantungan, tidak hanya pada orang lain melainkan juga pada hal-hal penting lainnya seperti menghilangkan ketergantungan pada kebodohan dan penderitaan. Selanjutnya konsep ini dikenal dengan sebutan skema keterbelakangan multidimensional.

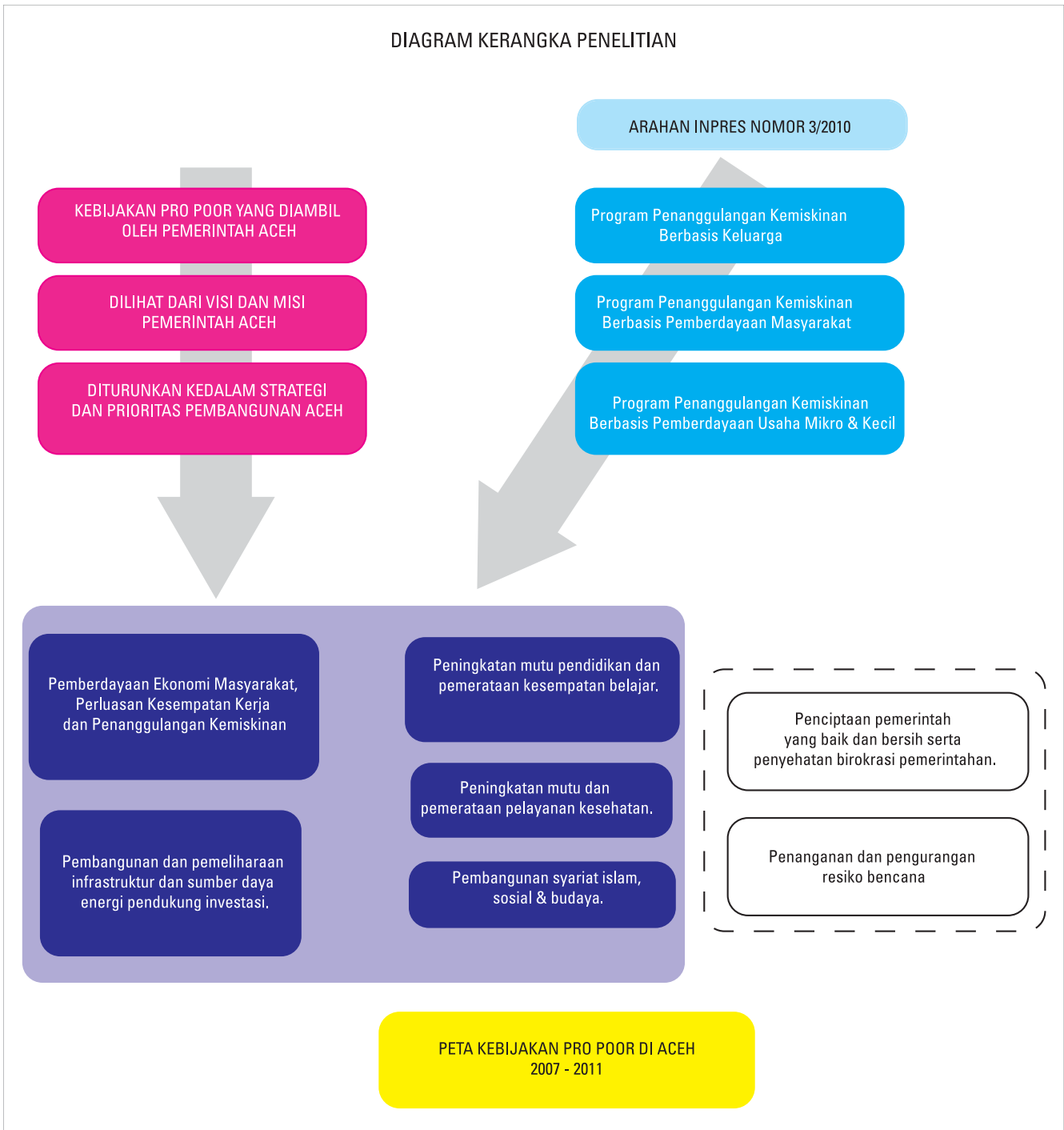
Konsekuensi dari ketiga sasaran pembangunan ekonomi diatas maka strategi pembangunan harus diarahkan pada empat hal yaitu: **satu**, upaya meningkatkan output riil dan produktivitas tinggi yang terus menerus meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan pokok. Secara teori kenaikan output riil akan mendorong kenaikan upah yang diterima para pekerja yang kemudian akan meingkatkan jumlah permintaan. Siklus ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam panjang. **Kedua**, arah strategi selanjutnya adalah tingkat penggunaan tenaga kerja

yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah yang akan dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang cukup. **Ketiga**, Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan terutama memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan. Terakhir, Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini mengikuti bagan alur seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut ini

DIAGRAM KERANGKA PENELITIAN



# Bab 3

## Metode Pemetaan Kebijakan

### 3.1. Metode Pemetaan

Pemetaan kebijakan *pro-poor* di Aceh dilakukan dengan mengadopsi metode penelitian deskriptif. Penggolongan kebijakan *pro-poor* dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria *pro-poor*, terutama kriteria yang dikembangkan oleh Korayem (2010) serta beberapa pandangan yang digagas oleh Klasen (2009) dan Duclos (2009).

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari para pengambil kebijakan, BPS dan sumber data lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data yang memberikan gambaran kebijakan yang diambil

oleh Pemerintah Aceh, sehingga sumber data utama adalah berbagai dokumen perencanaan milik pemerintah baik berupa RPJM Aceh, maupun Renstra SKPA. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya memberikan gambaran tentang kebijakan yang ditempuh pemerintah, tetapi juga membantu memetakan keadaan dan kondisi masyarakat terkait kemiskinan, isu-isu dan permasalahan yang dihadapi, serta kondisi masa depan yang diharapkan.

Kebijakan yang ditemukan dalam dokumen-dokumen yang ditelaah, baik dalam bentuk perencanaan maupun yang telah diimplementasikan secara aktual akan dikelompokkan kedalam peta kebijakan

*pro-poor*, sesuai dengan kriteria yang telah dikemukakan oleh Korayem, Klasen dan Duclos. Matriks akan dimanfaatkan untuk mentabulasikan kebijakan yang *pro-poor*, lalu hasil tabulasi akan dianalisis.

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam menentukan pemetaan kebijakan *pro poor* diperoleh dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan teknik dokumentasi. Melalui teknik FGD, data dikumpulkan dengan cara berdiskusi secara langsung kepada nara sumber yang berasal dari Kepala SKPA atau yang mewakilinya (sebagaimana terlampir). Sedangkan melalui teknik dokumentasi dikumpulkan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan data berupa dokumen RPJM, Renstra, KUA/PPAS, DPA SKPA yang terkait serta dokumen yang terkait.

### 3.3. Pemetaan Kebijakan Pro-Poor

Untuk keperluan pemetaan, penelitian ini mempelajari visi dan misi pemerintah untuk memahami arah dan masa depan pembangunan. Tanpa memahami visi dan misi, dirasakan akan sulit untuk memilah dan menggolongkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kedua, penelitian ini mempelajari prioritas-prioritas pembangunan yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh. Prioritas-prioritas biasanya dapat dengan mudah ditemukan pada RPJM. Dari prioritas-prioritas yang dimiliki oleh pemerintah Aceh, pemetaan ini akan mengerucut pada prioritas-prioritas yang

paling mirip polanya dengan prioritas-prioritas kebijakan *pro-poor*.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji seluruh program dan kegiatan berdasarkan prioritas-prioritas yang dianggap *pro-poor*. Program dan kegiatan dianggap *pro-poor* jika sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Korayem, Klasen dan Duclos. Program yang sesuai dengan kriteria Korayem, Klasen dan Duclos akan dicatat berikut alokasi dana indikatifnya.

Peta yang didapatkan akan diklasifikasikan menjadi tiga kriteria kebijakan *pro-poor* yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, yaitu:

- a. Penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga
- b. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- c. Penanggulangan kemiskinan berbasis pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

### 3.4. Sumber Informasi dan Data

Ada beberapa dokumen yang ditinjau dalam penelitian dan pemetaan kebijakan *pro-poor* ini, antara lain:

- a. Dokumen RPJMA dan RPJMA Perubahan
- b. DPA 2007 – 2012
- c. Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Aceh
- d. Dokumen Rencana Strategis Pendidikan Aceh
- e. Dokumen Renstra SKPA terkait

# Bab 4

## Kebijakan Pro-Poor Di Aceh, 2007-2011

### 4.1. Gambaran Umum Kemiskinan di Aceh

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar, pemberlakuan desentralisasi dan otonomi khusus membuat Aceh mengalami peningkatan kemampuan fiskal yang sangat besar. Selain itu, bantuan negara-negara donor dan berbagai lembaga internasional pasca bencana tsunami memperbesar jumlah uang yang beredar di Aceh. Kemampuan fiskal yang besar tersebut, diharapkan menjadi katalisator dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan fasilitas dan pelayanan publik di Aceh.

Namun demikian, pembangunan ekonomi pasca tsunami belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. Mengacu pada berbagai publikasi Badan Pusat Statistik Aceh, sejak tahun 2006 perekonomian Aceh tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Jika mengacu pada PDRB Aceh harga berlaku terlihat bahwa sejak tahun 2006 perekonomian Aceh memang mengalami pertumbuhan. Namun jika bercermin kepada PDRB harga konstan terlihat bahwa perekonomian justru bergerak turun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh beberapa tahun terakhir lebih disebabkan oleh proses kenaikan harga, sementara jika ditinjau dari sisi produksi terlihat



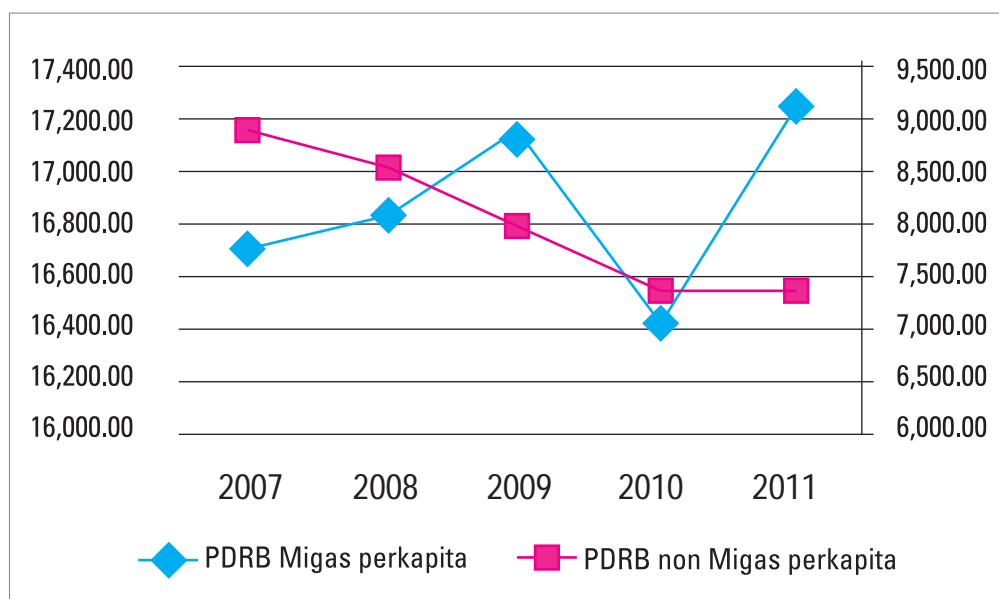
bahwa produksi di Aceh justru mengalami penurunan. Dengan kata lain inflasi yang terjadi tidak mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi lebih produktif.

Sebagai daerah agraris, sektor pertanian masih menjadi sektor penyumbang terbesar pembentuk PDRB Aceh, dengan demikian sektor pertanian diharapkan menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Aceh. Namun penyerapan tenaga kerja Aceh masih di bawah rata-rata nasional dimana penyerapan tenaga kerja masih terpusat di pedesaan dan dalam sektor informal. Menurut Laporan Pembangunan Manusia Aceh (UNDP; 2010) sektor informal Aceh memiliki peranan yang cukup besar dalam penyerapan pengangguran terbuka walau biasanya perkembangan sektor informal tidak dianggap sebagai kemajuan pembangunan. Salah satu faktor penghambat berkembangnya sektor formal adalah tingginya

tingkat upah minimum regional di Aceh.

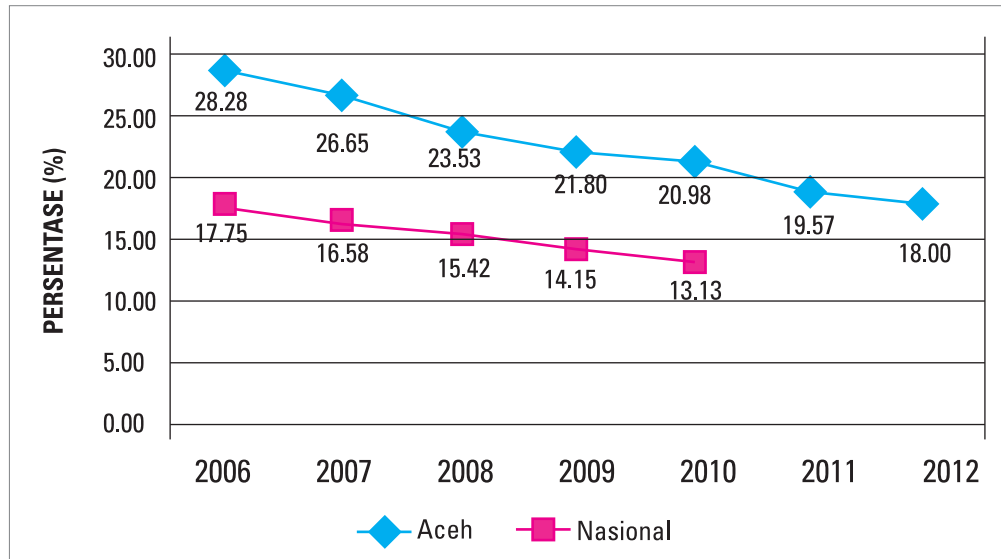
Walaupun demikian, penurunan PDRB harga konstan Aceh yang bergerak paradoks terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Aceh tetap mampu menekan angka kemiskinan di Aceh. BPS Aceh mencatat pada tahun 2008 angka kemiskinan Aceh mengalami penurunan yaitu sebesar 23,53 persen dari sebelumnya ditahun 2006 sebesar 28,28 persen dan berada jauh dari Nasional sebesar 15,42 persen. Namun pada tahun 2011 angka kemiskinan Aceh terus mengalami penurunan sebesar 19,57 persen dan hanya terpaut enam angka dengan laju penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 13,13 persen. Dalam periode 2007-2010, jumlah penduduk miskin Aceh menurun hingga 6 (enam) persen atau mencapai lebih dari dua ratus ribu jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 4.2.

**Grafik 4.1.** PDRB perkapita Non Migas Aceh Menggunakan Harga Berlaku dan Harga konstan 2010



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 4.2. Grafik Persentase Kemiskinan di Aceh Tahun 2006 s/d 2011



Sumber: BPS (data diolah)

Kabupaten Pidie Jaya. Namun pada tahun 2007 hingga 2010 persentase kemiskinan yang rendah hanya Kota Lhokseumawe dan Banda Aceh saja. Sedangkan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Kota Langsa termasuk dalam persentase sedang. Lebih jelasnya penyebaran klasifikasi persentase kemiskinan berdasarkan katagorinya dapat dilihat pada Lampiran 7, 8, 9, 10, 11 dan 12.

Mencermati perkembangan data kemiskinan Aceh, sebaran penduduk miskin lebih banyak

berada di pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Tahun 2007 jumlah penduduk miskin di pedesaan berjumlah 864.900 jiwa atau sekitar 79,81 persen dari total penduduk miskin dan di perkotaan hanya sebanyak 218.800 jiwa atau 20,19 persen. Proses penurunan jumlah penduduk miskin ternyata relatif tidak diikuti dengan perubahan komposisi sebaran penduduk miskin. Hingga tahun 2010 persentase penduduk miskin pedesaan relatif stabil di kisaran 79 persen dan di perkotaan hanya pada kisaran 20 persen.

Tabel 4.1. Jumlah, Pesentase, dan perbandingan penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di Aceh, 2007-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			% Penduduk Miskin			Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Total Jumlah Penduduk	
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa
2007	218,8	864,9	1083,7	18,68	29,87	26,65	20,19	79,81
2008	195,8	763,9	959,7	16,67	26,30	23,53	20,40	79,60
2009	182,2	710,7	892,9	15,44	24,37	21,8	20,41	79,59
2010	173,4	688,5	861,9	14,65	23,54	20,98	20,12	79,88

Sumber: Aceh Dalam Angka, 2011 (diolah)

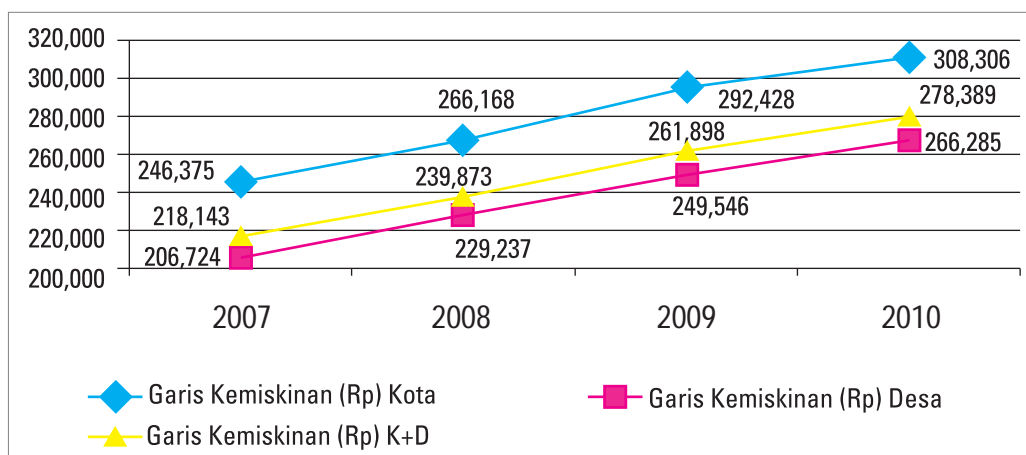
Permasalahan lain kemiskinan di Aceh adalah besarnya gap antara garis kemiskinan wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Dalam periode 2007-2010 garis kemiskinan perkotaan meningkat dari Rp 246.375,- menjadi Rp 308.306,- sedangkan di pedesaan meningkat dari hanya Rp 218.143,- pada tahun 2007 menjadi Rp 278.389,- pada tahun 2010. Hal ini tidak hanya menunjukkan rendahnya tingkat pendapatan di pedesaan melainkan juga menyatakan adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan dipedesaan.

Selama periode 2007-2010 kesenjangan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Aceh baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan terhadap garis kemiskinan semakin menurun. Namun demikian, walau memiliki garis kemiskinan yang lebih rendah, penduduk miskin di pedesaan relatif lebih

miskin dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya indeks kedalaman kemiskinan pedesaan di Aceh. Lebih lanjut, penyebaran pengeluaran penduduk miskin terhadap rata-ratanya di perkotaan juga lebih rendah daripada pedesaan. Dengan demikian tingkat kemiskinan di pedesaan lebih beragam dibandingkan perkotaan atau dengan kata lain tingkat keparahan kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan keparahan kemiskinan di perkotaan.

Dilihat dari sebaran penduduk miskin Aceh pada tahun 2010, penduduk miskin relatif tersebar merata di seluruh kab/kota di Aceh. Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu 26,23 persen diikuti dengan Kabupaten Pidie jaya (26,03 %) dan Kota Subulussalam (24,36 %). sedangkan daerah

Grafik 4.3. Pergerakan Garis Kemiskinan Aceh 2010



Sumber: www.bps.go.id

yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil adalah kota Banda Aceh yang memiliki persentase penduduk miskin kurang dari 10 persen yaitu 9,19 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2009, penduduk miskin Aceh menurun 21,61 persen menjadi 19,95 persen, walau begitu, penduduk miskin di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tenggara

justru mengalami peningkatan dimana Kota Banda Aceh naik sebesar 0,55 persen dan Aceh Tenggara naik sebesar 0,02 persen. Tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan kabupaten/kota di Aceh, serta kedalaman dan keparahan kemiskinan di Aceh.

**Tabel 4.2.** Persentase dan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Aceh

Kabupaten/ Kota	Persentase (%)						Garis Kemiskinan (rupiah)					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Simeulue	34,09	33,80	32,26	26,45	24,72	23,63	181.102	201.689	216.518	253.123	255.471	278.023
Aceh Singkil	29,20	28,41	28,54	23,27	21,06	19,39	168.566	191.539	208.087	213.997	257.778	280.534
Aceh Selatan	26,98	24,58	24,72	19,40	17,50	15,93	172.427	186.227	196.167	203.761	236.741	257.640
Aceh Tenggara	24,63	23,56	21,60	18,51	16,77	16,79	145.487	151.263	155.423	165.925	170.569	185.626
Aceh Timur	30,02	29,85	28,15	24,05	21,33	18,43	193.755	210.094	221.862	256.739	264.671	288.036
Aceh Tengah	27,68	26,68	24,41	23,36	21,43	20,10	213.832	232.783	246.435	283.307	305.619	332.598
Aceh Barat	35,50	34,54	32,63	29,96	27,09	24,43	221.402	265.514	297.287	335.955	341.606	371.762
Aceh Besar	29,40	28,66	26,69	21,52	20,09	18,80	250.416	259.910	266.749	285.876	308.440	324.096
Pidie	36,01	35,32	33,31	28,11	25,87	23,80	209.216	232.598	249.440	277.688	312.476	328.337
Bireuen	29,70	29,05	27,18	23,27	21,65	19,51	168.496	186.844	200.060	214.801	242.576	263.990
Aceh Utara	35,87	34,98	33,16	27,56	25,29	23,43	164.343	177.098	186.286	218.970	229.559	249.824
Aceh Barat Daya	28,29	28,30	28,63	23,42	21,33	19,94	147.016	176.979	198.562	231.460	231.758	252.217
Gayo Lues	33,97	33,51	32,31	26,57	24,22	23,91	198.398	201.566	203.848	231.260	232.481	253.004
Aceh Tamiang	24,50	23,89	22,19	22,29	19,96	17,99	183.064	196.461	206.110	240.753	274.295	298.509
Nagan Raya	36,18	35,25	33,61	28,11	26,22	24,07	204.919	235.306	257.193	288.593	294.493	320.490
Aceh Jaya	31,28	30,42	29,28	23,86	21,86	20,18	182.677	200.165	212.762	215.382	254.156	267.057
Bener Meriah	28,76	27,98	26,55	29,21	26,58	26,23	207.813	233.786	252.495	272.217	274.560	298.798
Pidie Jaya			35,00	30,26	27,97	26,08			228.601	274.078	309.857	337.211
Banda Aceh	8,37	8,25	6,61	9,56	8,64	9,19	276.736	317.435	346.750	362.992	414.172	435.195
Sabang	29,78	28,56	27,13	25,72	23,89	21,69	195.493	256.447	300.351	310.697	368.637	401.180
Langsa	14,98	13,95	14,25	17,97	16,20	15,01	132.703	157.377	175.149	199.628	248.283	270.201
Lhoksumawe	15,90	14,25	12,75	15,87	15,08	14,07	150.486	166.202	177.523	194.884	246.539	268.303
Subulussalam			30,16	28,99	26,80	24,36			166.693	168.953	201.149	218.906
Provinsi	28,69	28,28	26,65	23,53	21,80	20,98	172.084	198.858	218.143	239.873	261.898	278.389

Sumber: BPS (data diolah)

**Tabel 4.3.** Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Aceh 2007-2010

Tahun	P1(%)			P2(%)		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
2007	3,86	6,04	5,41	1,23	1,81	1,64
2008	3,55	5,47	4,92	1,07	1,67	1,5
2009	3,45	4,87	4,46	1,04	1,46	1,34
2010	2,83	4,63	4,11	0,79	1,45	1,26

Sumber: BPS (Data Diolah)

Indikasi penurunan jumlah penduduk miskin Aceh yang tercermin dalam informasi di atas, didukung oleh beberapa indeks lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Menurut Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh 2007-2012 menyebutkan dalam bidang kesehatan pada tahun 2007 angka kematian ibu turun secara signifikan dari 237/100.000 lahir hidup menjadi 184/100.000 lahir hidup pada tahun 2010. Angka kematian bayi dari 35/1.000 lahir hidup pada tahun 2007 turun menjadi 25/1.000 lahir hidup pada tahun 2010. Walau telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdasarkan laporan indeks pembangunan manusia Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh bekerja sama dengan UNDP mencerminkan kondisi kesehatan penduduk masih merupakan salah satu yang terburuk di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang masih diluar jarak yang wajar.

Peningkatan jumlah peserta didik dalam masing-masing tingkat pendidikan tercermin dalam data yang dirilis oleh BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) . Untuk usia pendidikan sekolah dasar, angka partisipasi sekolah meningkat dari

98,88 persen pada tahun 2006 menjadi 99,19 persen di tahun 2010. Pada tingkat pendidikan menengah pertama partisipasi penduduk meningkat dari 93,83 persen pada tahun 2006 menjadi 94,99 di tahun 2010. Demikian juga pada tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, dalam periode yang sama mengalami peningkatan yaitu pendidikan menengah naik dari 72,43 persen menjadi 73,53 persen dan pendidikan tinggi naik dari 20,95 persen menjadi 24,11 persen.

Dari sisi akses terhadap pendidikan Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat partisipasi sekolah tertinggi di Indonesia. Sepanjang tahun 2006-2010, partisipasi sekolah pada setiap level pendidikan selalu mengalami peningkatan dan pada saat yang bersamaan angka buta huruf juga mengalami penurunan. Namun demikian hal ini tidak dapat diartikan sebagai penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Saat ini di Aceh terdapat kecenderungan mobilitas penduduk menuju daerah-daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dimana hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Aceh.

Peningkatan jumlah peserta didik dalam masing-masing tingkat pendidikan tercermin dalam data yang dirilis oleh BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Untuk usia pendidikan sekolah dasar, angka partisipasi sekolah meningkat dari 98,88 persen pada tahun 2006 menjadi 99,19 persen di tahun 2010. Pada tingkat pendidikan menengah pertama partisipasi penduduk meningkat dari 93,83 persen pada tahun 2006 menjadi 94,99 di tahun 2010. Demikian juga pada tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, dalam periode yang sama mengalami peningkatan yaitu pendidikan menengah naik dari 72,43 persen menjadi

73,53 persen dan pendidikan tinggi naik dari 20,95 persen menjadi 24,11 persen.

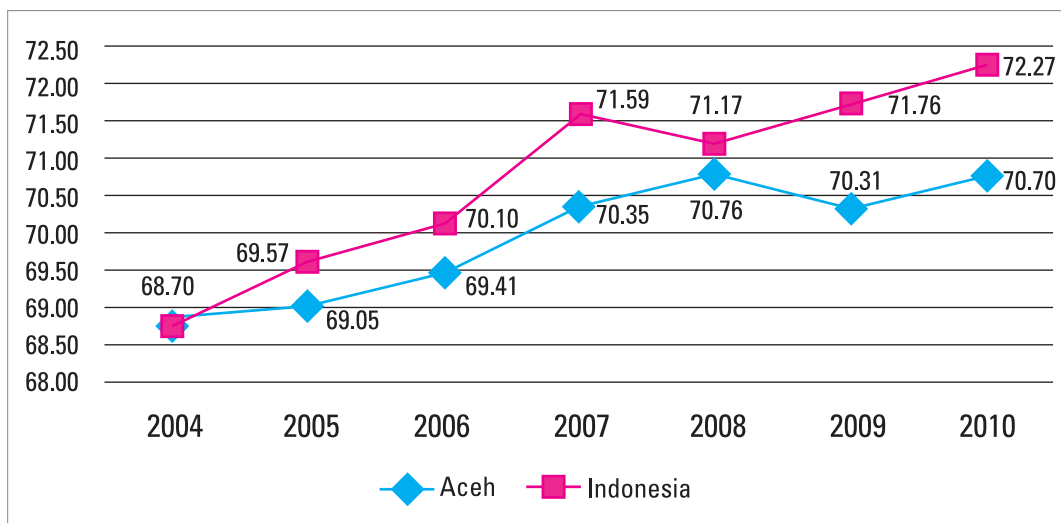
Jika mengacu pada indeks pembangunan manusia, kualitas kesejahteraan penduduk Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional. Sejak tahun 2006, kualitas penduduk Aceh relatif meningkat namun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional. Dalam skala nasional, pada tahun 2010 Aceh hanya berada pada posisi 17, lebih baik satu tingkat dari posisi tahun 2006 yang hanya di posisi 18. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak pembangunan ekonomi terhadap peningkatan kualitas manusia di Aceh

**Tabel 4.4.** Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Aceh 2006-2010

Usia/Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
7-12	98,88	98,95	99,03	99,07	99,19
13-15	93,83	94,06	94,15	94,31	94,99
16-18	72,43	72,79	72,73	72,74	73,53
19-24	20,95	23,6	23,13	22,82	24,11

Sumber: BPS (Data Diolah)

**Grafik 4.4.** IPM Aceh dan Indonesia, 2006-2010



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

belum sebaik daerah lain yang notabene tidak mempunyai kemampuan fiskal sebesar Aceh.

Berbagai program telah dilaksanakan pemerintah Aceh dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin di Aceh. Program penurunan tingkat kemiskinan yang disebut dengan jaring pengaman sosial sudah diterapkan pemerintah Aceh, dimana pemerintah Aceh memberikan perhatian pada sisi kesehatan penduduk miskin, dengan program jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Program JKA pada tahun 2010 mencakup anggaran sebesar Rp 344 milyar dengan jumlah peserta 1.361.158 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data yang tercatat dari jumlah kunjungan peserta JKA rawat jalan, yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit daerah, kunjungan persalinan dirumah sakit Daerah, dan yang dirawat di UGD.

Selain itu pemerintah Aceh terus melakukan pemberdayaan lembaga zakat Aceh atau Baitul Mal Aceh untuk lebih intensif menggali sumber-sumber potensi zakat baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat, dan didistribusikan secara merata kepada fakir miskin yang ada di Aceh. Pada periode tahun 2008-2010 Baitul Mal Aceh berhasil menghimpun zakat sebesar Rp 18,5 milyar dan setiap tahunnya didistribusikan zakat kepada 900 KK yang tersebar keseluruh provinsi Aceh.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemerintah Aceh mengalokasikan dana untuk mendukung program PNPM Mandiri dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong(BKPG) diantaranya;

penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya. Selain itu pemerintah pada tahun 2010 memberikan bantuan beasiswa anak yatim sebanyak 115.000 orang se Provinsi Aceh dengan nilai bantuan 1,8 juta per orang setahun dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar 208 miliar.

Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Aceh dalam menetapkan strategi pengurangan jumlah penduduk miskin dengan menitikberatkan berbagai program pembangunan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, antara lain melalui peningkatan pembangunan pertanian, pemberdayaan masyarakat nelayan, pemberdayaan koperasi dan UKM, pembangunan rumah kaum dhuafa, program pemberdayaan Gampong, serta pembangunan sarana dan prasarana pedesaan terutama dalam kaitan untuk meningkatkan akses terhadap sentra-sentra produksi desa. Dilaksanakannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) termasuk di Aceh juga merupakan salah satu faktor yang diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan karena sasaran utamanya adalah kelompok masyarakat miskin.

Banyaknya jumlah penduduk miskin di pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kualitas SDM penduduk desa lebih rendah, belum tersedianya infrastruktur pendukung yang baik serta masih kurangnya informasi dan akses keluar serta kurangnya motivasi.

#### 4.2. Visi dan Isu-Isu Strategis Kebijakan Pemerintah Aceh

Dari visi pemerintah Aceh, cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dan memerangi kemiskinan tergambar dengan jelas dan eksplisit. Visi yang dituangkan dalam RPJM Aceh tersebut adalah " Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran".

Visi pemerintahan ini memiliki kata kunci: fundamental transformation dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, yang dimaknai sebagai sebuah perubahan menuju bentuk pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabel, yang akan membawa kepada kemakmuran dan keadilan. Jika diperhatikan penjabaran visi melalui misi pemerintahan Aceh, maka terlihat bahwa misi yang terkait langsung dengan kesejahteraan yang berkeadilan adalah pertama, misi keempat: Pengembangan Sumberdaya Manusia, dengan fokus pemerataan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan alokasi bagi pendidikan (30 persen, lebih tinggi dari alokasi APBN untuk pendidikan 20 persen), peningkatan kualitas kesehatan dan pemberantasan penyakit menular, serta yang tidak kalah pentingnya,

meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, adat istiadat dan agama.

Selain itu, pada misi kelima, secara spesifik Pemerintah Aceh mengemban misi spesifik ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Melalui kebijakan ekonomi yang holistik, diharapkan kesejahteraan rakyat dapat meningkat dan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Kebijakan ekonomi tersebut dianggap sebagai kebijakan ekonomi holistic karena ruang lingkungannya cukup komprehensif, dimulai dari perhatian pembangunan pada infrastruktur pendukung perekonomian, fokus pada ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan, pengembangan pasar domestik dan internasional bagi produksi usaha rakyat, dan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan peka/sensitif terhadap bencana.

Dalam RPJMA, setelah menjabarkan kondisi daerah, persoalan dan isu strategis serta kekuatan keuangan daerah, Pemerintah Aceh secara spesifik menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan secara proporsional, yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energipendukung investasi.
3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataankesempatan belajar.



4. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.
5. Pembangunan syariat islam sosial dan budaya.
6. Penciptaan pemerintah yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi pemerintahan.
7. Penanganan dan pengurangan resiko bencana.

Jika dilihat berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Korayem, Duclos dan Klasen, maka empat prioritas, yaitu (1) Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan, (2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi; (3)Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, (4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, memiliki keterkaitan yang sangat

erat sebagai kebijakan *pro-poor*. Sedangkan kebijakan kelima, yaitu Pembangunan syariat islam sosial dan budaya memiliki ciri *pro-poor* seperti yang dikembangkan dalam Inpres No. 3/2009. Dua prioritas lainnya tidak memiliki ciri kebijakan *pro-poor*, namun demikian, keduanya diperlukan sebagai kebijakan pemerintah yang mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap tingginya resiko bencana dan pentingnya penyehatan birokrasi yang menjalankan seluruh roda pemerintahan.

Jika dilihat penjabaran strategi pembangunan berbasis prioritas pembangunan, terlihat secara eksplisit bahwa strategi tersebut mendekati pola kebijakan *pro-poor*. Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan beberapa strategi yang mendekati pola kebijakan *pro-poor* berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Aceh.

**Tabel 4.5.** Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan Pro-Poor Pada Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berkelanjutan	Peningkatan serta percepatan upaya revitalisasi pertanian dan perikanan sehingga menjadi sektor ekonomi andalan yang berkelanjutan
Pengembangan komoditi unggulan daerah melalui pola kluster dengan memperkuat sistim mata rantai produksi (supply chain)	Mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan terutama yang berbasis bahan baku local
Pembangunan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pendukung produksi termasuk prioritas fungsionalisasi aset, terutama di kawasankawasan sentra produksi pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan	Pemberdayaan UMKM, koperasi, serta memfasilitasi terjalannya kemitraan dengan kelompok usaha besar

Sumber: BPS (Data Diolah)

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan	Peningkatkan kualitas sumber daya petani, nelayan, dan kompetensi tenaga kerja
Pengembangan dan peningkatan kapasitas unit penyedia sarana produksi serta peningkatan pengendalian dan pengawasan distribusi sarana produksi sehingga mudah dapat diakses oleh masyarakat	Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan serta perbaikan gizi Masyarakat
Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi termasuk peningkatan Indeks Penanaman (IP), dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di kawasan sekitar hutan, serta pengembangan hutan tanaman rakyat
Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil, terutama yang berbasis bahan baku lokal di kawasan-kawasan sentra produksi	
Peningkatan kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku UMKM melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja serta pelatihan-pelatihan kejuruan	
Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan penyaluran tenaga kerja untuk kebutuhan lokal maupun luar negeri	
Percepatan aplikasi teknologi di sektor pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan sistem penyuluhan	
Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama usaha-usaha kelompok dan koperasi	
Memfasilitasi peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga	
Mengupayakan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, terutama penyaluran kredit bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga	
Pencegahan penebangan dan perdagangan kayu illegal melalui penguatan dan pembinaan satuan pengamanan hutan dalam rangka terciptanya hutan lestari dan pengembangan ekonomi berkelanjutan	
Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengembangan hutan rakyat	
Meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan pangan, serta peningkatan panganeekaragaman pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya local	
Melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi bahan pangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Penyediaan fasilitas pemukiman baru pada kawasab-kawasan potensi dan memberikan bantuan stimulasi untuk pengembangan usaha ekonomi bagi penduduk yang dimukimkan berbasis potensi lokal.	
Pengembangan sistem informasi dan promosi yang dapat menarik investasi untuk menanamkan modalnya di daerah, baik PMA maupun PMDN.	
Mengupayakan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan dalam daerah hingga terjadinya pasar sempurna, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi barang serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pemasaran	
Melakukan upaya meningkatnya ekspor daerah baik peningkatan volume maupun nilai, terutama komoditi-komoditi yang memiliki nilai tambah tinggi bagi daerah	

Sumber: BPS (Data Diolah)

Penjabaran strategi dari prioritas yang telah ditetapkan telah mengikuti pola-pola kebijakan *pro-poor*, di mana strategi yang dipilih melibatkan masyarakat miskin dan secara langsung mempengaruhi kelompok miskin tersebut. Komposisi masyarakat miskin di Aceh paling tinggi berada pada kelompok petani dan nelayan, sehingga revitalisasi pertanian dan perikanan dianggap akan mampu meningkatkan pendapatan kelompok miskin. Industri-industri pengolahan berskala kecil dianggap pula mampu meningkatkan pendapatan kelompok miskin, menyerap tenaga kerja (mengurangi pengangguran) dan menyerap bahan baku lokal yang juga diproduksi secara individu dan berskala kecil.

Pemberdayaan UMKM dan koperasi serta membangun kemitraan usaha mikro dan kecil-menengah dengan usaha makro akan mendatangkan manfaat yang besar bagi

kelompok miskin yang memiliki usaha mikro dan koperasi. Demikian juga dengan upaya untuk meningkatkan sumber daya petani dan nelayan, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan yang pada akhirnya akan meningkatkan kehidupan kelompok miskin secara umum. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan akan memastikan terpeliharanya kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pola pikir mereka untuk tidak merambah hutan yang pada akhirnya akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum.

Untuk prioritas pembangunan terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumberdaya energi pendukung investasi, strategi yang mendekati pola kebijakan *pro-poor* tersaji dalam Tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4.6.** Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan *Pro-Poor* Pada Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi.

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Terlaksananya pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir serta terehabilitasinya sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami.	Membangun dan meningkatkan irigasi teknis pada lahan-lahan potensial serta membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah secara terkendali.
Terlaksananya pengembangan sistem transportasi wilayah terpadu, harmonis dan sinergi serta aparatur yang mandiri.	Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai, muara, dan pantai yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air.
Terbangunnya sarana angkutan kereta api di wilayah pesisir timur Aceh yang menghubungkan Aceh ke batas Sumatera Utara sepanjang 486 Km.	Membangun konstruksi pengendali daya rusak air di sungai, muara, dan pantai serta fasilitas sarana peringatan dini banjir kiriman sungai.
Terbangunnya pelabuhan baru di wilayah Pantai Barat-Selatan dan pantai Utara - Timur dengan kapasitas 10.000 DTW.	Mendukung pembangunan kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan yang memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah kawasan.
Terlaksananya pengembangan pelabuhan Malahayati untuk mendukung Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.	Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir, perbatasan dan kepulauan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah
Terlaksananya pembangunan dan pengembangan bandara untuk melayani penerbangan Domestik dan Internasional serta meningkatkan pelayanan transportasi udar antar kabupaten/Kota.	Menyediakan sarana dan prasarana dasar pemukiman, air bersih, sanitasi, fasilitas umum bagi masyarakat, dengan berpedoman kepada tata ruang serta tata bangunan yang mempertimbangkan resiko bencana sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan termasuk pembangunan kawasan perbatasan dan terisolir.
Terkendalinya pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Menyediakan rumah sederhana bagi kaum dhuafa/korban kerusuhan/bencana alam
Terkendalinya pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) secara berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya.	Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara sehingga memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat
Terpeliharanya terumbu karang, mangrove dan konservasi daerah aliran sungai dalam rangka memulihkan kembali daya dukung lingkungan danantisipasi ancaman terhadap abrasi pantai dan sungai.	Mengembangkan angkutan kereta api sebagai angkutan massal yang cepat, murah, hemat energi, berwawasan lingkungan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang
Terbangunnya ruang terbuka hijau dan desa model yang ramah lingkungan di setiap kabupaten/kota.	Membangun pelabuhan baru dengan kapasitas >10.000 DWT di wilayah pantai Barat-Selatan dan pantai Utara-Timur sehingga dapat menjadi pusat penyebaran (hub) dan pintu masuk bagi kegiatan ekspor-impor bagi masing-masing wilayah tersebut sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap pelabuhan Belawan (SUMUT).

Sumber: BPS (Data Diolah)

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan serta penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan pembangunan dan investasi.	Melakukan penelitian dampak lingkungan penggunaan mercury, khususnya di kawasan pertambangan emas Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya; Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan Geumpang Kabupaten Pidie, serta Valuasi Ekonomi Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Aneuk Laot di Kota Sabang.
Terlaksananya penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah serta pengembangan dan penguatan lembaga pertanahan.	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang meliputi antara lain pengendalian konflik satwa, penetapan tapal batas antara Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan di luar KEL.
Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca penggunaan tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, identifikasi dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform.	Menginventarisasi penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi lemah dan wilayah perbatasan.
Terealisasinya peningkatan peluang eksploitasi pertambangan skala besar, menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.	
Terbangunnya sarana dan prasarana sumber-sumber air bawah tanah yang memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air.	
Terlaksananya pembangunan PLTMH baik skala besar maupun kecil terutama untuk pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN.	
Terealisasinya penambahan pembangkit listrik non diesel dengan memanfaatkan potensi energi primer pada sub-sistem isolated dengan sasaran pengurangan biaya pokok penyediaan (BPP) yang berpengaruh terhadap usaha menekan biaya operasional pada sektor pembangkitan dan harga tarif (Rp/kWh) penjualan energi listrik.	

Sumber: BPS (Data Diolah)

Pemerintah Aceh memfokuskan pada pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan sumberdaya energi yang mendukung investasi dengan tujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah, serta merangsang tumbuhnya investasi daerah, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari strategi-strategi tersebut, beberapa diantaranya memiliki pola yang mendekati pola kebijakan *pro-poor*, yang secara spesifik memiliki dampak

langsung terhadap perbaikan kondisi kehidupan kelompok miskin.

Strategi peningkatan irigasi teknis diharapkan mampu meningkatkan jumlah areal pertanian produktif dan potensial yang memiliki irigasi dan diharapkan kelompok petani dapat berproduksi secara lebih efektif, dibandingkan jika areal pertanian tadah hujan. Perbaikan kondisi di daerah pesisir juga diharapkan mampu

mengoptimalkan peran wilayah pesisir dan muara sungai, yang sering dimanfaatkan oleh nelayan tangkap dan budidaya.

Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembukaan akses kepada wilayah-wilayah terpencil, kepulauan dan perbatasan akan mampu mengurangi kesenjangan antar-wilayah dan mendorong perbaikan kondisi dan kualitas hidup masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Selain sarana dan prasarana pemukiman, pemerintah Aceh juga berupaya mengembangkan jaringan kereta api sebagai angkutan massal yang lebih murah dan hemat energi serta meningkatkan pelabuhan untuk

membantu pengangkutan barang hasil produksi dari sentra produksi ke pasar. Kedua fasilitas ini diharapkan dapat memperlancar produksi, mempercepat distribusi dan memungkinkan terbukanya pasar internasional. Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan dapat mengurangi ongkos produksi dan distribusi, karena sifatnya yang massal dan kemampuan fasilitas ini untuk memindahkan orang dan barang dalam jumlah besar. Terkait isu kepemilikan tanah bagi kelompok miskin, pemerintah juga mengupayakan tersedianya sertifikat tanah bagi penduduk miskin dan penduduk di wilayah perbatasan.

Untuk prioritas peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, berbagai strategi yang mendekati pola kebijakan *pro-poor* disajikan dalam Tabel 4.7 di bawah ini:

**Tabel 4.7.** Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan *Pro-Poor* Pada Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi.

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Tersedianya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.	Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah.
Terlaksananya efektivitas internal dan tingkat kelangsungan sekolah di setiap jenjang pendidikan.	Meningkatkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan dunia usaha.
Tersedianya fasilitas pendidikan yang fokus dalam rangka menghapus hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan dasar dan menengah di daerah-daerah terpencil, pemukiman terpencar dan daerah kepulauan.	
Tersedianya fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang bermutu.	Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang bermutu
Terciptanya kinerja pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Mengupayakan desentralisasi sekolah /manajemen kelembagaan, dan manajemen perencanaan pengembangan guru

Sumber: BPS (data diolah)

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Terwujudnya desentralisasi sekolah / manajemen kelembagaan, dan manajemen perencanaan pengembangan guru.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembelajaran yang bermutu
Tersedianya kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Mengembangkan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan dayah.
Tersedianya sarana penunjang pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.	Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah
Terwujudnya pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan dayah.	
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah.	
Terlaksananya penelitian dan pengembangan pendidikan secara optimal	

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 (diolah)

Pada prioritas peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, strategi yang dimanfaatkan adalah melalui mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia dini hingga menengah, termasuk dayah. Strategi demikian sangat mirip dengan pola kebijakan *pro-poor* untuk memastikan kelompok miskin mampu menikmati layanan pendidikan. Pada daerah-daerah terpencil, pemerintah mengembangkan fasilitas pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Pola demikian juga bersentuhan langsung dengan kebutuhan kelompok miskin, dan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan pendidikan pada daerah-daerah terpencil. Sedangkan strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas kurikulum, perbaikan manajemen sekolah, pengembangan program pendidikan unggulan, dirasakan pula

mampu mempengaruhi peningkatan mutu layanan pendidikan, termasuk pula peningkatan mutu pelayanan kepada kelompok miskin.

Untuk prioritas peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan, berbagai strategi yang mendekati pola kebijakan *pro-poor* disajikan dalam Tabel 4.8 di bawah ini:

**Tabel 4.8.** Strategi Pembangunan yang Mendekati Pola Kebijakan *Pro-Poor* Pada Prioritas Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan

Kebijakan Pro-Poor	Strategi Pembangunan
Terbangunnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.	Meningkatkan pelayanan kesehatan minimal bagi masyarakat
Tersedianya tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui perencanaan yang tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas yang sesuai untuk mendukung pembangunan sistem kesehatan daerah.
Tersedianya fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang mudah dijangkau	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan termasuk penanggulangan bencana.
Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.	Memperkuat mekanisme rujukan dengan memanfaatkan rumah sakit dengan pelayanan unggulan.
Terciptanya mekanisme rujukan yang baik antar institusi pelayanan kesehatan.	Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis data teknologi.
Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan diseluruh lapisan masyarakat.	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Terlaksananya penerapan pola BLU Rumah Sakit di Kabupaten/Kota.	Meningkatkan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin di seluruh Aceh (JKA) dalam bentuk pengobatan gratis
Terbangunnya fasilitas pendidikan yang memadai dalam rangka peningkatan pengetahuan tenaga medis.	
Terwujudnya pelaksanaan program JKA dalam rangka pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas secara gratis kepada masyarakat miskin.	

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 (diolah)

Sedangkan untuk prioritas kelima, berbagai strategi *pro-poor* yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh Aceh;
- b. Mengembangkan dan membangun ekonomi masyarakat pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

### 4.3. Program dan Kegiatan Pemerintah Aceh yang Pro-Poor

Dari berbagai program strategis yang diambil dan ditempuh oleh pemerintah selama periode 2007 – 2011, maka dapat ditemukan berbagai informasi yang dapat dipetakan kedalam peta kebijakan *pro-poor* di Aceh. Program tersebut digolongkan kedalam kebijakan *pro-poor* karena kesesuaiannya dengan kriteria kebijakan *pro-poor*, seperti kelompok penerima manfaatnya



yang langsung berasal dari kelompok miskin, atau hasil dari program tersebut yang dapat menyediakan akses dan kemudahan bagi kelompok miskin, atau hasil yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan kelompok miskin dengan tingkat perubahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dampak terhadap penghasilan kelompok bukan miskin.

#### 4.3.1. Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 4.9 berikut ini menyajikan ringkasan informasi penting terkait dengan berbagai program dan kegiatan yang digolongkan program *pro-poor* sesuai dengan prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan:

Dari tabel di bawah, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2007 – 2011, Pemerintah Aceh

melaksanakan 38 buah program di prioritas pertamanya yang masuk dalam kategori *pro-poor*. Total pengeluaran untuk melaksanakan 38 buah program tersebut sebesar Rp 3.76 triliun dengan total pengeluaran tahunan terbesar adalah sekitar Rp 1.25 triliun (terjadi tahun 2009) dan total pengeluaran tahunan terendah tercatat sebesar Rp 155.36 miliar (terjadi pada tahun 2007).

Program *pro-poor* di prioritas ini yang menyerap anggaran paling besar adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 772 miliar. Program ini menyerap lebih dari 20 persen atau lebih dari seperlima dari total pengeluaran *pro-poor*. Ada sepuluh buah program *pro-poor* yang mendominasi pengeluaran anggaran, dengan total anggaran hampir Rp 2.9 triliun, menyerap lebih dari 75 persen atau lebih dari dua pertiga total pengeluaran yang *pro-poor*. Dari sepuluh buah program dominan tersebut, empat terbesar digunakan untuk menangani

**Tabel 4.9.** Ringkasan Program dan Kegiatan *Pro-Poor* untuk Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan (2007 – 2011)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Program Strategis yang <i>pro poor</i> (buah) dari total (buah)	38/60
2	Total Pengeluaran Untuk <i>Pro-Poor</i> (Rp)	3,761,047,065,590.00
3	Total Pengeluaran Tahunan Terbesar (Rp)	1,248,922,461,120.00
4	Total Pengeluaran Tahunan Terendah (Rp)	155,364,403,785.00
5	Program dengan Pengeluaran Terbesar adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Rp)	772,532,168,372.00
6	Total pengeluaran 10 besar program <i>pro-poor</i> (Rp)	2,842,536,245,626.00

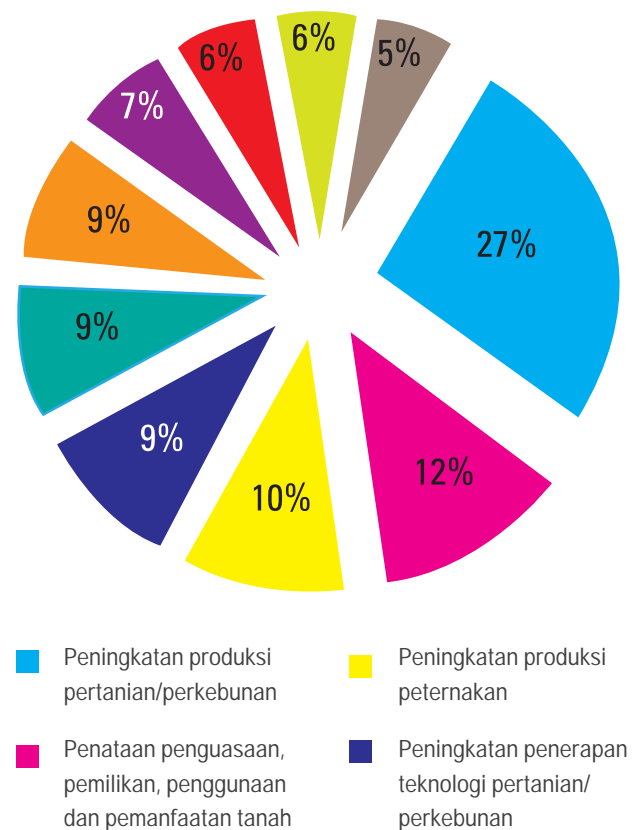
Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 (diolah)

kemiskinan di kelompok petani/pekebun dengan total pengeluaran Rp 1.66 triliun, atau sekitar 44 persen dari total pengeluaran *pro-poor* di prioritas ini. Lebih lanjut lagi, total pengeluaran untuk masyarakat miskin di kelompok petani yang masuk dalam sepuluh besar pengeluaran tercatat senilai Rp 1.82 triliun, dengan share lebih dari 48 persen. Data ini memberikan gambaran bahwa selama periode penelitian, Pemerintah Aceh fokus pada pengentasan kemiskinan di kelompok petani. Hal ini terlihat dari data bahwa hampir separuh pengeluaran yang tergolong *pro-poor* digunakan untuk membantu kelompok miskin di sektor pertanian/perkebunan, termasuk membangun infrastruktur, menyediakan lahan, membuka perkebunan, dan penyediaan peralatan dan bibit.

Selain upaya untuk mengatasi kemiskinan di kelompok petani, ada juga alokasi yang cukup besar (senilai 11 persen atau Rp 413.58 miliar) untuk membantu mengatasi kemiskinan di kelompok nelayan. Meskipun angka pengeluarannya terlihat cukup besar, namun terlihat ada kesenjangan antara pengeluaran untuk kelompok petani dan nelayan, dan diharapkan agar Pemerintah Aceh dapat memberikan perhatian yang lebih besar (yang tercermin dari jumlah belanja yang lebih besar) untuk mengatasi kemiskinan di kelompok nelayan. Untuk melihat secara lengkap program dan kegiatan yang tergolong *pro-poor* dalam prioritas pertama ini, dapat dilihat pada lampiran.

Proporsi dari masing-masing program dengan pengeluaran terbesar dapat dilihat dari diagram pie di bawah ini:

**Grafik 4.5.** Share Sepuluh Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan



Dari prioritas pertama yang difokuskan oleh Pemerintah Aceh, terlihat bahwa pedoman kategorisasi kebijakan *pro-poor* seperti yang diamanahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 telah dipedomani dengan cukup baik. Pada prioritas pertama, terutama pada program yang menyedot alokasi anggaran paling besar, terlihat bahwa Pemerintah Aceh telah mengupayakan untuk mengatasi

kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pedoman dari Inpres Nomor 3/2010 untuk memberdayakan kelompok miskin melalui pendekatan pemberdayaan keluarga telah pula dilakukan, misalnya dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan berbasis keluarga, seperti: (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; (2) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan sebagainya. Sedangkan melalui pendekatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, Pemerintah Aceh mengadopsinya melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, yang bahkan mencakup kepentingan kelompok-kelompok miskin yang bekerja di sector informal, yaitu melalui Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

#### 4.3.2. Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi

Tabel 4.10. di bawah ini memberikan ringkasan informasi tentang program dan kegiatan *pro-poor* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dalam prioritas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi.

Dari tabel di bawah, terlihat bahwa dalam prioritas ini, Pemerintah Aceh menjalankan 14 buah program yang masuk kategori *pro-poor*. Total pengeluaran untuk 14 program tersebut tercatat hampir Rp 8.46 triliun. Total pengeluaran tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu hampir Rp 2.79 triliun, dan total pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2007, yaitu hampir Rp 308.05 miliar.

**Tabel 4.10.** Ringkasan Program dan Kegiatan *Pro-Poor* untuk Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi (2007 – 2011)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Program Strategis yang <i>pro poor</i> (buah) dari total (buah)	14/35
2	Total Pengeluaran Untuk <i>Pro-Poor</i> (Rp)	8,458,797,045,309.00
3	Total Pengeluaran Tahunan Terbesar (Rp)	2,782,275,030,700.00
4	Total Pengeluaran Tahunan Terendah (Rp)	308,049,183,883.00
5	Program dengan Pengeluaran Terbesar adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang menyerap (Rp)	3,301,308,733,551.00
6	Share pengeluaran untuk jalan dan jembatan (%)	39.03
7	Total pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (Rp)	6,660,437,329,834.00
8	Share pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (%)	78.74
9	Total Pengeluaran untuk infrastruktur pedesaan (Rp)	1,174,709,065,073.00
10	Share pengeluaran untuk infrastruktur pedesaan (%)	13.89
11	Total Pengeluaran untuk irigasi dan jaringan pengairan lainnya (Rp)	1,088,633,453,534.00
12	Share pengeluaran untuk irigasi dan jaringan pengairan lainnya (%)	12.87

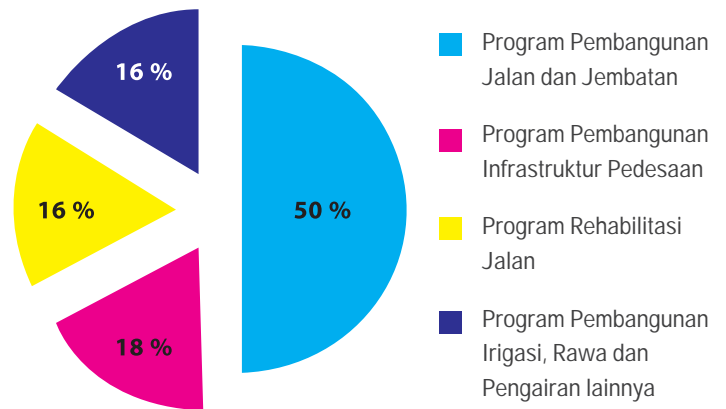
Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 (diolah)

Program dengan pengeluaran terbesar adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang menyerap lebih dari Rp 3.3 triliun (39.03 persen). Pengeluaran untuk pembangunan jalan dan jembatan menyerap lebih dari 1/3 bagian dari total pengeluaran di prioritas ini.

Empat program besar menyerap pengeluaran tertinggi, dengan angka penyerapan pengeluaran lebih dari Rp 6.6 triliun atau 78.74 persen. Pengeluaran untuk membangun infrastruktur pedesaan mencapai Rp 1.17 triliun, atau hampir 14 persen dari total pengeluaran *pro-poor* pada prioritas ini. Jumlah pengeluaran dan share yang hampir sama nilainya diserap oleh program pembangunan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, yaitu senilai Rp 1.09 triliun atau hampir 13 persen dari total pengeluaran *pro-poor* (lihat grafik berikut ini).

#### 4.3.3. Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

**Grafik 4.6.** Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi



Tabel 4.11. di bawah ini memberikan ringkasan informasi tentang program dan kegiatan *pro-poor* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dalam prioritas peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar.

**Tabel 4.11.** Ringkasan Program dan Kegiatan *Pro-Poor* untuk Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar (2007 – 2011)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Program Strategis yang <i>pro poor</i> (buah) dari total (buah)	12/15
2	Total Pengeluaran Untuk <i>Pro-Poor</i> (Rp)	3,464,043,087,388.00
3	Total Pengeluaran Tahunan Terbesar (Rp)	1,119,664,781,935.00
4	Total Pengeluaran Tahunan Terendah (Rp)	153,685,136,402.00
5	Program dengan Pengeluaran Terbesar adalah Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun (Rp)	1,584,094,248,917.00
6	Share pengeluaran untuk program Wajib Belajar Dasar 9 Tahun (%)	45.73
7	Total pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (Rp)	2,971,805,285,866.00
8	Share pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (%)	85.79

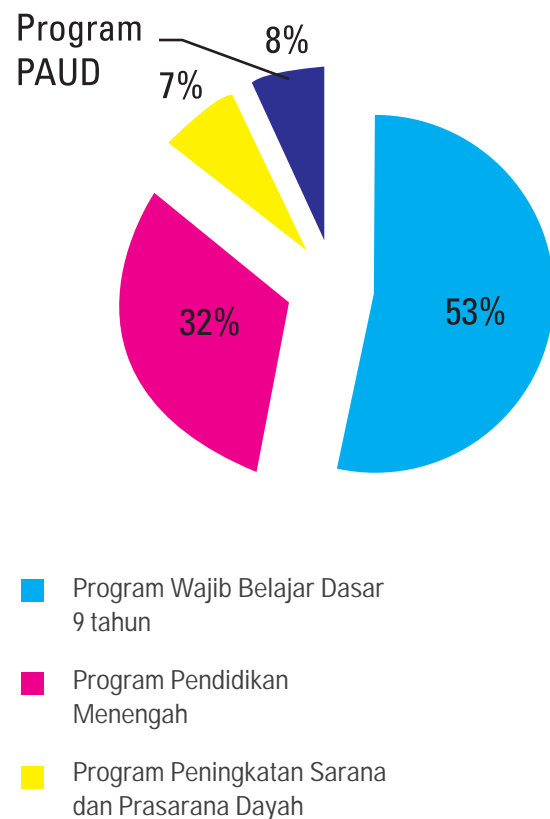
Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama kurun waktu 2007 – 2011, Pemerintah Aceh menjalankan 12 program di prioritas pendidikan yang tergolong *pro-poor*. Selusin program ini menyerap hampir Rp 3.5 triliun. Pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2009, yaitu hampir Rp 1.12 triliun dan pengeluaran paling rendah terjadi pada tahun 2007, yang menyerap lebih dari Rp 153.68 miliar.

Program *pro-poor* yang paling banyak menyerap pengeluaran adalah Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun yang menyerap pengeluaran lebih dari Rp 1.58 triliun. Share program ini dari total pengeluaran *pro-poor* adalah lebih dari 45.73 persen, atau hampir separuh dari total pengeluaran *pro-poor*.

Dilihat dari jumlah pengeluarannya, ada empat program yang menyerap anggaran paling banyak, dengan penyerapan anggaran lebih dari 85 persen. Pengeluaran paling besar dikeluarkan untuk program wajib belajar 9 tahun, diikuti program pendidikan menengah, pembangunan sarana dan prasarana dayah, dan program pendidikan anak usia dini. Keempat program ini menyerap anggaran hampir Rp 3 triliun (lihat grafik pie berikut ini):

**Grafik 4.7.** Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar



#### 4.3.4. Program dan Kegiatan Pro-Poor untuk Prioritas Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Tabel 4.12 di bawah ini memberikan ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dalam prioritas peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Jumlah program yang masuk dalam kategori *pro-poor* adalah sebanyak 14 buah program. Serapan pengeluarannya mencapai lebih dari Rp 1.8 triliun. Pengeluaran tahunan terbesar terjadi pada tahun 2011, dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 633 miliar. Sedangkan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2007, dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 64 miliar.

Dilihat dari besaran anggaran yang diserap oleh masing-masing program, maka program yang menyerap anggaran paling besar adalah program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, yang merupakan payung program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program ini menyerap lebih dari Rp 661 miliar, dengan share sebesar 36.53 persen dari total pengeluaran *pro-poor* di prioritas ini.

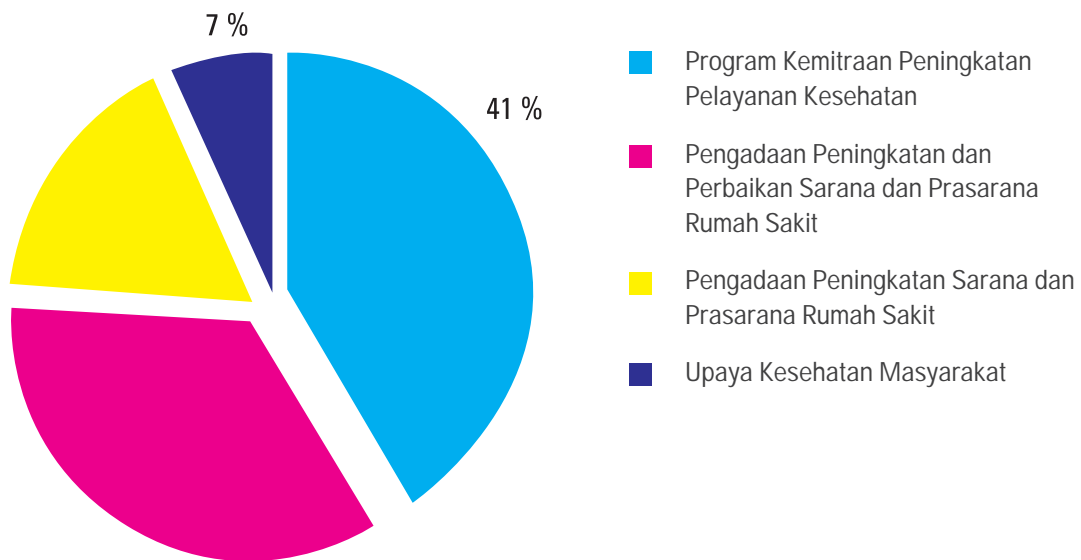
Dilihat dari besarnya penyerapan anggaran untuk empat program dengan pengeluaran paling besar, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dan program yang membangun sarana dan prasarana, termasuk program pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan posyandu mendapatkan alokasi pengeluaran yang signifikan dengan total pengeluaran hampir Rp 1.6 triliun dengan share lebih dari 88 persen (lihat grafik di bawah ini):

**Tabel 4.12.** Ringkasan Program dan Kegiatan *Pro-Poor* untuk Prioritas Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan (2007 – 2011)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Program Strategis yang <i>pro poor</i> (buah) dari total (buah)	14/18
2	Total Pengeluaran Untuk <i>Pro-Poor</i> (Rp)	1,811,984,626,632.00
3	Total Pengeluaran Tahunan Terbesar (Rp) di tahun 2011	633,202,259,587.00
4	Total Pengeluaran Tahunan Terendah (Rp) di tahun 2007	64,541,118,139.00
5	Program dengan Pengeluaran Terbesar adalah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Rp)	661,886,438,763.00
6	Share pengeluaran untuk program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (%)	36.53
7	Total pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (Rp)	1,596,365,017,728.00
8	Share pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (%)	88.10

Sumber: Data Penelitian, 2012 (diolah)

**Grafik 4.8.** Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan



#### 4.3.5. Program dan Kegiatan Pro-Poor yang ditemukan pada Prioritas kelima

Tabel 4.13 di bawah ini menunjukkan beberapa program dan kegiatan yang berada pada prioritas kelima: Pembangunan Syariat Islam,

Sosial dan Budaya. Prioritas ini tidak memiliki ciri yang dikembangkan oleh model mapping yang digunakan dalam penelitian ini, akan tetapi memiliki ciri *pro-poor* yang Sesuai kategori yang dipakai, ada delapan program

**Tabel 4.13.** Ringkasan Program dan Kegiatan *Pro-Poor* untuk Prioritas Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya (2007 – 2011)

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Program Strategis yang <i>pro poor</i> (buah) dari total (buah)	8/25
2	Total Pengeluaran Untuk <i>Pro-Poor</i> (Rp)	398,934,402,644
3	Total Pengeluaran Tahunan Terbesar (Rp) di tahun 2009	127,755,405,440
4	Total Pengeluaran Tahunan Terendah (Rp) di tahun 2007	53,457,716,145
5	Program dengan Pengeluaran Terbesar adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Rp)	225,974,356,367
6	Share pengeluaran untuk program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (%)	56.65
7	Total pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (Rp)	358,058,202,911
8	Share pengeluaran 4 besar program <i>pro-poor</i> (%)	89.75

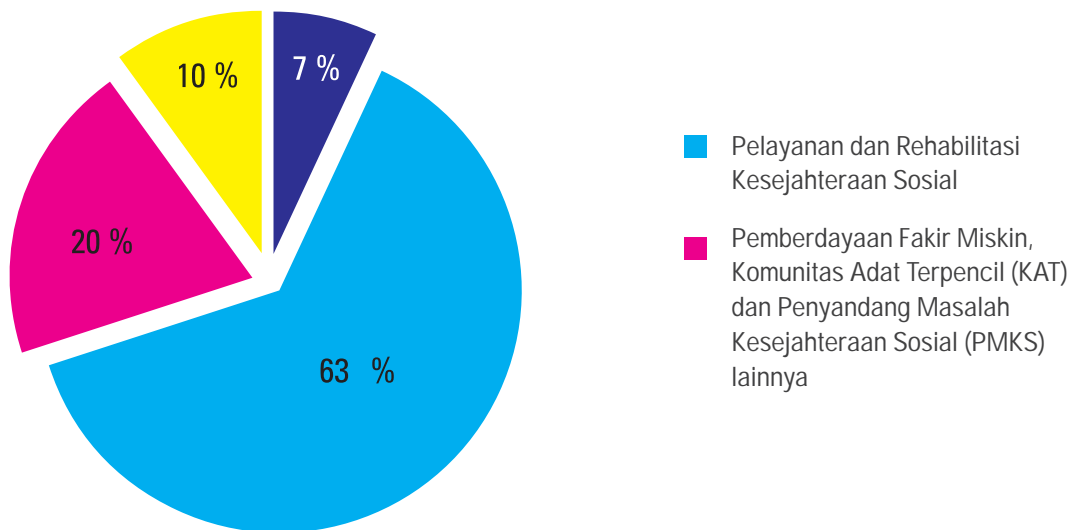
Sumber: Data Penelitian, 2012 (diolah)

yang dikategorikan *pro-poor* dengan total serapan anggaran hampir Rp 399 miliar. Total pengeluaran tahunan terbesar adalah hampir Rp 128 miliar, terjadi pada tahun 2009, dan total pengeluaran tahunan terkecil adalah sekitar Rp 53.5 miliar, terjadi tahun 2007.

Program yang menyerap pengeluaran terbesar adalah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang menyerap hampir

Rp 226 miliar atau sekitar 56.65 persen dari total pengeluaran untuk *pro-poor*. Jika dilihat dari 4 program dengan pengeluaran terbesar, tercatat pengeluaran sebesar lebih dari Rp 358 miliar, yang menyedot hampir 90 persen total pengeluaran *pro-poor* (lihat diagram di bawah ini)

**Grafik 4.9.** Share Empat Program dengan Pengeluaran Terbesar di Prioritas Pembangunan Syariah Islam, Sosial dan Budaya





# Bab 5

## Kesimpulan Dan Rekomendasi

### 5.1. Kesimpulan

1. Kemiskinan dan keterbelakangan masih merupakan isu pembangunan ekonomi di Aceh. Dalam periode penelitian, terlihat bahwa sejak 2007-2011, garis kemiskinan Aceh selalu berada di bawah garis kemiskinan Indonesia. Hal ini meng kan upaya pengentasan kemiskinan di Aceh merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan membutuhkan perhatian lebih serius dari Pemerintah Aceh. Tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Aceh juga cukup mengkhawatirkan. Dalam periode penelitian, indeks keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di Aceh masih jauh dari indeks yang sama secara nasional.
2. Jika dilihat dari indikasi ketimpangan distribusi pendapatan pada kelompok miskin di Aceh, distribusi pendapatan di kelompok miskin di Aceh masih lebih baik dari angka nasional. Namun, upaya tersebut masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan, karena secara kualitas, ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM), angka IPM Aceh masih jauh di bawah IPM Nasional. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Aceh untuk selalu mengetahui kondisi aktual dari masyarakat miskin, mempelajari akar persoalan kemiskinan di Aceh dan mengupayakan perbaikan-perbaikan

- kebijakan *pro-poor* yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh.
3. Pemerintah Aceh selama tahun 2007-2011 memiliki 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh. Dari 7 (tujuh) prioritas tersebut, 5 (lima) di antaranya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan *pro-poor*. Keempat prioritas itu adalah: (1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan; (2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi; (3) Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar; (4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dan (5) Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya.
  4. Dari prioritas pertama, Pemerintah Aceh melaksanakan 38 program yang dikategorikan *Pro-Poor*, dengan alokasi Rp 3.76 triliun dengan total pengeluaran tahunan terbesar sekitar Rp 1.25 triliun (terjadi tahun 2009) dan total pengeluaran tahunan terendah tercatat sebesar Rp 155.36 miliar (terjadi pada tahun 2007). Program dengan jumlah pengeluaran terbesar adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan alokasi lebih dari Rp 772 miliar. Dari 38 program, terdapat 10 (sepuluh) program *pro-poor* yang menyerap lebih 2/3 alokasi anggaran *pro-poor*. Dari 10 besar pengeluaran ini, 4 (empat) program menargetkan pengentasan kemiskinan pada kelompok petani/pekebun dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 1.66 triliun. Alokasi sebesar hampir setengah triliun digunakan untuk mengatasi kemiskinan pada kelompok nelayan. Pada prioritas ini, Pemerintah Aceh memiliki banyak keselarasan dengan arahan dari Inpres Nomor 3/2010.
  5. Dari prioritas kedua, Pemerintah Aceh melaksanakan 14 program yang dikategorikan *Pro-Poor*, dengan alokasi sebesar hampir Rp 8.5 triliun. Total pengeluaran tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu hampir Rp 2.79 triliun, dan total pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2007, yaitu hampir Rp 308.05 miliar. Program dengan pengeluaran terbesar adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, yang menyerap lebih dari Rp 3.3 triliun (39.03 persen). Pengeluaran untuk pembangunan jalan dan jembatan menyerap lebih dari 1/3 bagian dari total pengeluaran di prioritas ini. Empat program besar menyerap pengeluaran tertinggi, dengan angka penyerapan pengeluaran lebih dari Rp 6.6 triliun atau 78.74 persen. Pengeluaran untuk membangun infrastruktur pedesaan mencapai Rp 1.17 triliun, atau hampir 14 persen dari total pengeluaran *pro-poor* pada prioritas ini. Jumlah pengeluaran dan share yang hampir sama nilainya diserap oleh program pembangunan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, yaitu senilai Rp 1.09 triliun atau hampir 13 persen dari total pengeluaran *pro-poor*.
  6. Dari prioritas ketiga, Pemerintah

Aceh melaksanakan 12 program yang dikategorikan *Pro-Poor*, menyerap hampir Rp 3.5 triliun. Pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2009, yaitu hampir Rp 1.12 triliun dan pengeluaran paling rendah terjadi pada tahun 2007, yang menyerap lebih dari Rp 153.68 miliar. Program *pro-poor* dengan alokasi terbanyak adalah Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun yang menyerap pengeluaran lebih dari Rp 1.58 triliun. Share program ini dari total pengeluaran *pro-poor* adalah lebih dari 45.73 persen, atau hampir separuh dari total pengeluaran *pro-poor*. empat program yang menyerap anggaran paling banyak, menyerap anggaran lebih dari 85 persen dari total anggaran *pro-poor* pada prioritas ketiga. Pengeluaran paling besar dikeluarkan untuk program wajib belajar 9 tahun, diikuti program pendidikan menengah, pembangunan sarana dan prasarana dayah, dan program pendidikan anak usia dini. Keempat program ini menyerap anggaran hampir Rp 3 triliun.

7. Dari prioritas keempat, Pemerintah Aceh melaksanakan 14 program yang dikategorikan *Pro-Poor*. Serapan pengeluarannya mencapai lebih dari Rp 1.8 triliun. Pengeluaran tahunan terbesar terjadi pada tahun 2011, dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 633 miliar. Sedangkan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2007, dengan pengeluaran sebesar lebih dari Rp 64 miliar. Dilihat dari besaran anggaran yang diserap oleh masing-masing program, maka program yang menyerap anggaran

paling besar adalah program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, yang merupakan payung program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Program ini menyerap lebih dari Rp 661 miliar, dengan share sebesar 36.53 persen dari total pengeluaran *pro-poor* di prioritas ini.

8. Dari prioritas kelima, Pemerintah Aceh melaksanakan delapan program yang dikategorikan *Pro-Poor*, dengan total serapan anggaran hampir Rp 399 miliar. Total pengeluaran tahunan terbesar adalah hampir Rp 128 miliar, terjadi pada tahun 2009. Dan total pengeluaran tahunan terkecil adalah sekitar Rp 53.5 miliar, terjadi tahun 2007. Program yang menyerap pengeluaran terbesar adalah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang menyerap hampir Rp 226 miliar atau sekitar 56.65 persen dari total pengeluaran untuk *pro-poor*.

## 5.2. Rekomendasi

### 1. Memahami Kemiskinan Secara Lebih Komprehensif.

Kebijakan *pro-poor* akan lebih efektif jika pengambil kebijakan lebih memahami persoalan-persoalan penyebab kemiskinan, serta karakteristik rumah tangga miskin dan sangat miskin. Derajat kemiskinan (dari kemiskinan absolut yang memiliki ciri kefakiran hingga orang/keluarga dengan peluang menjadi miskin yang tinggi) juga harus dipahami secara lebih komprehensif. Pemahaman persoalan kemiskinan tersebut diintegrasikan dengan

proses perencanaan pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dari proses tersebut dapat lebih mengarah pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan berbagai kajian dan survey yang memfokuskan pada tema-tema kemiskinan dan mengembangkan diskusi terfokus dalam mengembangkan opsi-opsi kebijakan. Bappeda Aceh diharapkan menjadi **leading sector** di dalam membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemiskinan.

### 2. Fokus Pada Kemiskinan di Kelompok

**Nelayan.** Selama periode 2007 – 2011, upaya mengentaskan kemiskinan di kelompok petani cukup dominan baik dari segi jumlah program dan kegiatan, maupun dari segi alokasi anggaran. Kemiskinan di kelompok nelayan perlu mendapatkan perhatian yang sama.

#### **Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh**

menjadi **leading sector** di dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan kemiskinan kelompok nelayan dan masyarakat wilayah pesisir, serta kemiskinan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil, serta mengembangkan program prioritas pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan persoalan dan karakteristik kemiskinan.

### 3. Fokus Pada Upaya Meningkatkan Manfaat Langsung dari Program/Kegiatan Pembangunan.

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat

didesain untuk memastikan meningkatnya manfaat langsung yang diterima oleh individu dan rumah tangga miskin. Dengan demikian, dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut akan lebih memberikan dampak yang lebih besar untuk mengurangi kemiskinan.

#### **Bappeda Aceh** menjadi **leading sector**

untuk memastikan proses pembahasan program dan kegiatan tahunan berlangsung lebih terarah dan disiplin. Program dan kegiatan tahunan yang dibahas dapat diarahkan manfaatnya secara langsung bagi individu dan rumah tangga miskin.

### 4. Alokasi sumberdaya untuk pengentasan

**kemiskinan** menjadi kunci dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan. Alokasi sumberdaya, terutama sumberdaya finansial, sepatutnya disesuaikan dengan derajat prioritas pemerintah. Semakin tinggi derajat prioritas, semakin tinggi alokasinya. Selain itu, perlu pula dikaji lebih lanjut tentang program dan kegiatan *pro-poor* mana yang memberikan dampak/manfaat paling tinggi. Program dan kegiatan tersebut perlu mendapatkan alokasi yang lebih tinggi, agar manfaat yang diterima masyarakat menjadi lebih tinggi pula.

#### **Bappeda Aceh** menjadi **leading sector**

untuk memastikan keselarasan antara prioritas dengan alokasi anggarannya.

### 5. Evaluasi program dan kegiatan *pro-poor*

dilakukan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam menjalankan kebijakan *pro-poor*.

Proses evaluasi dilakukan untuk memberikan

masuk kepada pengambil kebijakan agar dapat menyusun program dan kegiatan jangka menengah yang baru. Berbagai persoalan implementatif seperti pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kelemahan perencanaan program, serta berbagai persoalan lainnya dapat dievaluasi secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan kebijakan *pro-poor* di masa mendatang menjadi lebih berkualitas.

## Daftar Kepustakaan

- Anonim. 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan Aceh*. Dinas Kesehatan Aceh.
- Anonim. 2010. *Kerangka Acuan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)*, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.
- Anonim. 2010. *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan*.
- Anonim. 2011. *Revisi Renstra Tahun 2011*. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh.
- Anonim. 2011. *Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2007 s.d. 2012*, Majelis Pendidikan Aceh.
- Anonim. 2011. *Rencana Kerja dan Strategis Tahun 2007 – 2012*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.
- Anand, Sudhir and Ravi Kanbur. 1993. "Inequality and Development: A Critique." *Journal of Development Economics*. Volume 41. Pp 19-43.
- Araar, Abdulkrim et.al. 2009, "Testing for Pro-Poorness of Growth, with an Application to Mexico," *Review of Income and Wealth*, Series 55, Number 4, December 2009.
- Badan Pusat Statistik, *Aceh Dalam Angka* (berbagai edisi).
- Bahany, Nab., Zulhanuddin Hasibuan, Muhammad Hamzah, 2009. Menuju Kemandirian Gampong, Yayasan PUGAR Aceh.
- Birdsall, Nancy, David Ross dan Richard Sabot. 1995. *Inequality and Growth Reconsidered: Lessons from East Asia*, *World Bank Economic Review*, Volume 9 Issue 3, pp. 477-508.
- Duclos, Jean-Yves. 2009. "What is Pro-Poor?" *Social Choice and Welfare Journal* Vol. 32.
- El Ouardighi, Jalal dan Rabija Somun-Kapetanovic, 2009. "Is Growth Pro-Poor in the Balkan Region?" *Eastern Europe Economics*, vol. 48 no. 3
- Gillis, Malcolm. 2001. "Economics of Development", W.W. Norton & Co Publisher, 5th edition.
- Kakwani, N., dan E. Pernia. 2000. "What is Pro-Poor Growth?" *Asian Development Review* vol. 16 No. 1
- Klasen, S. 2008. "Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement Issues Using Income and Nonincome Indicators." *World Development*, vol 36 No. 3
- Korayem, Karima. 2004. "Pro-Poor Policies in Egypt: Identification and Assessment", *International Journal of Political Economy*, vol. 32 No.2
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Cetakan Pertama, Unit penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

## Lampiran 1 Program Dan Kegiatan Pro-Poor Pada Prioritas 1

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
1.Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan	1.Penanggulangan Kemiskinan	1.Pemberdayaan ekonomi produktif gampong	L + TL	31,010,992,400
		2.Perencanaan dan pemberdayaan khusus pemukiman baru masyarakat tertinggal	L + TL	251,037,000
		3.Identifikasi potensi masyarakat miskin	L + TL	8,000,000,000
	2.Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	TL	-
		2.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	TL	-
		3.Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	TL	807,522,650
		4.Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat	TL	1,270,347,500
		5.Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	TL	1294772000
		6.Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA)	L + TL	506,680,000
		7.Operasionalisasi dan pelaksanaan teknis penyediaan alokasi dana gampong (ADG)/alokasi dana pemakmue gampong	L + TL	-
		8.Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program mandiri terpadu	L + TL	-
	3.Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.Pembinaan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP)	TL	-
		2.Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin	L	1,009,417,500
		3.Pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK)	TL	1,427,470,000
		4.Pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan PKBS BBM	TL	2,890,380,000
		5.Pelatihan manajemen pemerintahan desa	TL	920,000,000
		6.Pembinaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	L + TL	615,515,000

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
3,573,700,000	2,969,786,000	1,419,700,000	740,579,400	39,714,757,800
1,435,699,400	1,755,913,000	14,505,598,400	-	17,948,247,800
-	-	-	-	8,000,000,000
-	-	-	2,160,112,000	2,160,112,000
-	-	-	7,179,801,250	7,179,801,250
2,783,550,500	2,120,835,000	952,562,000	1,535,948,000	8,200,418,150
894,344,500	1,718,258,000	1,375,467,600	1,922,130,800	7,180,548,400
2,180,890,500	2,793,758,500	2,060,686,800	2,436,473,000	10,766,580,800
4,027,426,000	11,073,059,000	2,960,985,000	2,063,712,500	20,631,862,500
-	9,146,996,397	7,546,493,050	6,039,164,000	22,732,653,447
-	-	667,825,000	910,142,000	1,577,967,000
-	-	1,505,795,076	383,006,326	1,888,801,402
791,401,000	579,225,000	572,189,000	647,286,088	3,599,518,588
1,578,160,000	204,108,240	35,200,000	50,000,000	3,294,938,240
80,600,000	95,100,000	58,200,000	52,400,000	3,176,680,000
901,850,000	1,030,490,000	1,110,430,000	-	3,962,770,000
1,451,780,000	953,920,000	-	-	3,021,215,000



Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
	4.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.Peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dan SDM gampong/kelurahan	TL	355,480,000	
		2.Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong /kelurahan	L + TL	-	
	5.Pengembangan industri kecil dan menengah	1.Fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan menengah	L + TL	924,572,710	
	6.Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.Fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah	L + TL	-	
	7.Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	TL	811,690,000	
		2.Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	TL	-	
	8.Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1.Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	L	1,000,000,000	
	9.Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif	1.Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	TL	206,670,000	
		2.Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah	TL	1,686,485,000	
	10.Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	1.Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	TL	124,042,500	
		2.Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	TL	334,740,000	
	11.Pengembangan pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	1.Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	TL	282,667,500	
		2.Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	TL	961,374,000	
3.Penyelenggaraan promosi produk UMKM		TL	36,980,000		
12.Peningkatan ketahanan pangan	1.Pengembangan diversifikasi tanaman	TL	-		
	2.Pengembangan perbenihan/ Pembibitan	TL	-		
	3.Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	TL	-		
13.Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	TL	-		
	2.Pengendalian dan pemantapan alih teknologi pengendalian hama terpadu (PHT)	TL	608,621,000		
	3.Peningkatan Sumber Daya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	TL	417,750,000		

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
1,290,730,000	1,744,046,000	792,620,000	188,172,000	4,371,048,000
3,183,526,000	4,579,176,000	5,385,811,800	29,774,782,400	42,923,296,200
-	1,481,800,000	1,000,000,000	1,443,830,000	4,850,202,710
-	28,856,815,250	18,904,999,763	13,010,656,518	60,772,471,531
-	3,056,051,000	205,390,000	736,910,000	4,810,041,000
-	-	-	578,847,500	578,847,500
-	57,886,354,750	46,197,214,000	55,114,373,000	-160,197,941,750
-	-	-	1,427,420,000	1,634,090,000
-	-	-	-	1,686,485,000
-	294,604,000	177,759,000	268,054,000	864,459,500
-	260,500,000	201,454,000	355,268,000	1,151,962,000
-	-	-	228,210,000	510,877,500
-	2,498,862,500	7,305,860,974	6,082,977,594	16,849,075,068
-	-	-	-	36,980,000
-	7,678,889,148	-	4,290,940,000	11,969,829,148
-	10,049,042,500	-	-	10,049,042,500
-	60,306,240,000	-	392,660,000	60,698,900,000
-	98,653,418,500	94,297,758,262	58,181,357,944	251,132,534,706
-	-	-	-	608,621,000
-	-	-	-	417,750,000

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
14. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan		1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	TL	-
		2. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	TL	1,168,665,000
		3. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit	TL	3,794,210,000
		4. Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Rakyat	TL	2,456,520,000
		5. Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	TL	4,533,055,000
		6. Pengembangan komoditi Perkebunan Dalam Rangka Pemberdayaan Komunitas Daerah Terpencil	L + TL	3,500,000,000
15. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan		1. Pengembangan hutan tanaman	TL	-
		2. Pengembangan hasil hutan non kayu	TL	76,770,000
		3. Pembinaan dan pengendalian industri dan peredaran hasil hutan	TL	-
		4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	TL	804,332,700
16. Rehabilitasi hutan dan lahan		1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	TL	-
		2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	TL	516,308,000
		3. Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam	TL	-
17. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		1. Pengembangan taman hutan raya pocut merah intan	TL	2,689,464,000
		2. Pengelolaan Kawasan lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan	TL	853,980,000
		3. Penanganan kayu pasca banjir	TL	892,228,000
18. Peningkatan kesejahteraan petani		1. Pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat	TL	-
19. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		1. Pengendalian dan pemantapan alih teknologi pengendalian hama terpadu (PHT)	TL	-
		2. Peningkatan sumberdaya teknologi pengolahan hasil perkebunan	TL	-

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
-	51,214,209,500	34,497,505,960	37,427,145,286	123,138,860,746
-	7,195,204,000	12,677,211,250	3,028,765,000	24,069,845,250
-	-	-	-	3,794,210,000
-	-	-	-	2,456,520,000
-	-	-	-	4,533,055,000
-	-	-	-	3,500,000,000
-	2,040,000,000	6,706,410,650	6,736,537,650	15,482,948,300
-	691,406,250	3,050,865,800	559,850,000	4,378,892,050
-	-	-	137,845,000	137,845,000
-	-	-	-	804,332,700
-	5,434,003,750	2,703,064,431	3,796,949,560	11,934,017,741
-	-	-	-	
-	290,750,000	1,000,000,000	-	1,290,750,000
-	-	1,250,000,000	1,177,290,000	5,116,754,000
-	-	-	-	853,980,000
-	-	-	-	892,228,000
-	5,345,345,000	14,928,039,526	10,485,145,332	30,758,529,858
1,500,370,000	1,295,015,000	3,830,780,000	2,014,956,000	8,641,121,000
3,289,350,000	450,000,000	378,000,000	1,738,080,000	5,855,430,000

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
20. Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan		1. Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan	TL	-
		2. Pembangunan kebun kelapa sawit	TL	-
		3. Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat	TL	-
		4. Pengembangan usaha perbenihan, penyediaan bibit dan pengawasan peredaran benih perkebunan	TL	-
		5. Pembangunan kebun karet rakyat	TL	-
		6. Pembangunan kebun kakao rakyat	TL	-
		7. Pengembangan komoditi Perkebunan Dalam Rangka Pemberdayaan Komunitas Daerah Terpencil	L + TL	-
		8. Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan di kabupaten lokasi masyarakat miskin dan terasing dalam provinsi NAD	L + TL	-
21. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	TL	328,389,469
22. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan		1. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan	TL	-
		2. Pengawasan dan penertiban illegal fishing	TL	24,750,000
		3. Identifikasi dan penangkaran ikan	TL	-
23. Pengembangan budidaya perikanan		1. Pengembangan bibit ikan unggul	TL	1,456,565,000
		2. Pembinaan dan pengembangan perikanan	TL	4,695,976,500
		3. Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air tawar	TL	-
		4. Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air payau	TL	-
		5. Pengendalian dan pencegahan penebaran penyakit ikan	TL	-
		6. Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan	TL	-
24. Pengembangan perikanan tangkap		1. Motorisasi armada perikanan dalam upaya daya delajah dan produktivitas nelayan	TL	4,855,492,500
		2. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	TL	4,175,092,500
		3. Pengadaan alat bantu operasional penang kapan ikan	TL	-

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
841,140,000	247,044,100	271,900,000	288,100,000	1,648,184,100
136,801,500,000	43,658,280,000	119,051,808,000	51,089,759,808	350,601,347,808
82,461,470,500	56,667,214,400	24,996,443,464	11,666,320,948	175,791,449,312
44,229,000,000	3,343,935,000	2,593,170,000	5,127,236,262	55,293,341,262
	24,309,300,000	17,472,829,945	22,702,555,000	64,484,684,945
63,942,642,500	2,850,000,000	8,890,000,000	23,256,671,945	98,939,314,445
328,800,000	-	-	-	328,800,000
25,445,046,500	-	-	-	25,445,046,500
-	60,000,000	204,320,000	1,137,350,000	1,730,059,469
-	-	-	424,000,000	424,000,000
-	164,320,000	433,820,000	87,250,000	710,140,000
-	-	1,300,000,000	-	1,300,000,000
6,351,000,000	13,739,900,000	11,386,202,500	11,944,396,627	44,878,064,127
33,066,367,500	26,695,590,000	11,256,487,500	10,228,583,000	85,943,004,500
-	6,649,495,000	4,312,480,000	1,295,200,000	12,257,175,000
-	7,594,200,000	9,029,460,000	8,610,078,964	25,233,738,964
-	-	140,000,000	120,000,000	260,000,000
-	-	553,320,000	-	553,320,000
17,391,560,000	26,913,590,000	7,520,619,422	6,141,736,000	62,822,997,922
-	58,935,659,000	57,172,261,458	63,865,804,093	184,148,817,051
-	-	-	5,114,020,000	5,114,020,000

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
25.Peningkatan kesejahteraan petani	25.Peningkatan kesejahteraan petani	1.Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	TL	-	
		2.Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	TL	-	
		3.Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	TL	419,390,000	
	26.Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	26.Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	1.Penanganan daerah rawan pangan	TL	1,577,642,150
			2.Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	TL	605,008,000
			3.Pengembangan desa mandiri pangan	TL	2,021,185,000
			4.Pengembangan modal distribusi pangan yang efisien	TL	25,000,000,000
			5.Pemberdayaan lembaga mandiri dan mengakar di masyarakat	TL	-
			6.Diversifikasi pangan melalui moderisasi aneka ragam pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga	TL	-
			7.Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian : Perluasan areal Lahan (Lahan Sawah 25.000 Ha)	TL	8,268,400,000
			8.Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	TL	92,790,000
			9.Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	TL	214,225,000
			10.Pengembangan cadangan pangan daerah	TL	84,370,000
			11.Pengembangan Intesifikasi Tanaman Padi/ Palawija	TL	-
			12.Pengembangan Lumbung Pangan Desa	TL	-
27.Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	27.Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	1.Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	TL	-	
28.Peningkatan Kualitas Kelembagaan	28.Peningkatan Kualitas Kelembagaan	1.Peningkatan Kelembagaan Petani	TL	-	
		2.Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	TL	-	
		3.Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	TL	-	
		4.Penanggulangan kasus flu burung	TL	1,725,206,104	
		5.Diagnosa penyakit hewan dan mutu genetik	TL	369,855,000	
		6.Pemeliharaan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	TL	1,185,748,552	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
200,000,000	213,900,000	-	2,381,750,000	2,795,650,000
806,000,000	-	-	785,140,000	1,591,140,000
195,401,250	-	-	-	614,791,250
256,000,000	255,530,000	1,410,000,000	1,766,000,000	5,265,172,150
455,000,000	727,685,000	405,500,000	150,000,000	2,343,193,000
461,500,000	1,507,120,000	1,880,000,000	2,430,000,000	8,299,805,000
5,489,000,000	2,104,465,000	132,000,000	87,000,000	32,812,465,000
283,600,000	194,750,000	139,000,000	143,000,000	760,350,000
-	-	474,500,000	1,392,300,000	1,866,800,000
60,306,240,000	-	-	-	68,574,640,000
105,000,000	69,200,000	-	-	266,990,000
-	-	-	-	214,225,000
-	-	-	-	84,370,000
200,000,000	-	-	-	200,000,000
180,000,000	670,800,000	-	-	850,800,000
-	2,563,125,000	2,992,000,000	7,429,696,557	12,984,821,557
265,645,000	204,245,000	-	-	469,890,000
-	-	-	10,787,312,911	10,787,312,911
-	-	-	230,000,000	230,000,000
514,125,000	233,060,000	217,100,000	458,500,000	3,147,991,104
737,142,000	1,679,225,000	727,400,400	910,850,000	4,424,472,400
7,958,849,500	9,586,657,125	13,692,899,150	-	32,424,154,327



Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
29.Peningkatan produksi hasil peternakan		1.Pembibitan dan perawatan ternak	TL	1,083,350,000	
		2.Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	TL	6,285,330,000	
		3.Pengembangan agribisnis peternakan	TL	309,270,000	
		4.Pengembangan kawasan ayam ras petelur	TL	129,405,000	
		5.Pembangunan kebun rumput, hijauan makanan ternak (HMT) dan padang penggembalaan	TL	467,860,000	
		6.Pengembangan kawasan peternakan terpadu	TL	1,060,000,000	
		7.Perencanaan pembangunan peternakan	TL	368,505,000	
		8.Pengembangan inseminasi buatan	TL	-	
30.Peningkatan penerapan teknologi peternakan		1.Penyuluhan, penerapan teknologi peternakan tepat guna	TL	269,675,000	
		2.Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	TL	500,000,000	
31.Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		1.Pembangunan balai latihan kerja	TL	-	
		2.Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan pencari kerja	TL	-	
		3.Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	TL	3,398,613,750	
		4.Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	TL	-	
		5.Penyebaran informasi bursa Tenaga Kerja	TL	-	
32.Peningkatan kesempatan kerja		1.Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	TL	32,300,000	
		2.Penyebaran informasi bursa tenaga kerja	TL	328,759,000	
		3.Kerjasama pendidikan dan pelatihan	TL	-	
		4.Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	TL	222,080,000	
		5.Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	TL	282,677,500	
		6.Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	TL	1,933,032,000	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
24,405,480,000	29,949,381,600	29,231,530,950	16,285,226,189	100,954,968,739
-	30,985,300,000	4,296,745,000	19,784,117,100	16,285,226,189
30,665,301,500	20,234,238,500	6,981,981,750	2,080,249,000	60,271,040,750
784,575,000	11,782,787,150	9,863,920,000	8,899,116,500	31,459,803,650
-	-	-	1,028,636,000	1,496,496,000
-	-	-	26,716,388,800	27,776,388,800
688,881,575	559,640,000	642,360,000	630,875,000	2,890,261,575
-	-	949,472,500	1,766,000,000	2,715,472,500
192,627,425	197,630,000	-	99,180,000	759,112,425
1,000,000,000	2,496,120,000	-	848,446,625	4,844,566,625
-	4,413,000,000	17,493,689,773	10,004,733,900	31,911,423,673
-	7,777,000,000	1,575,000,000	1,465,061,350	10,817,061,350
-	2,363,320,000	3,680,391,000	2,194,177,000	11,636,501,750
5,193,795,000	-	-	-	5,193,795,000
640,578,500	-	-	-	640,578,500
-	248,300,000	248,300,000	207,299,000	736,199,000
-	-	-	596,400,000	925,159,000
-	1,032,350,000	-	330,000,000	1,362,350,000
-	-	100,000,000	1,461,859,748	1,783,939,748
-	299,050,000	2,712,305,875	3,577,739,400	6,871,772,775
-	-	-	-	1,933,032,000

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
33. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		1. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	TL	462,600,000	
		2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	TL	64,400,000	
		3. Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	TL	657,710,000	
34. Pengembangan wilayah transmigrasi		1. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	TL	-	
		2. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	TL	-	
		3. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	TL	-	
		4. Pemantapan rancangan program dan informasi pembangunan serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program	TL	-	
35. Transmigrasi lokal		1. Pelatihan transmigrasi lokal	L	-	
36. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi		1. Pengembangan potensi unggulan daerah	TL	300,000,000	
37. Penyiapan Potensi Sumberdaya; Sarana dan Prasarana Daerah		1. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	TL	752,057,500	
38. Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		1. Inventarisasi penggunaan lahan	TL	-	
		2. Pengadaan tanah/lahan kawasan	TL	-	
<b>TOTAL</b>				155,048,449,985	
<b>Manfaat Langsung</b>				2,009,417,500	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
565,100,000	481,150,000	466,150,000	451,640,000	2,426,640,000
912,105,000	115,400,000	57,700,000	89,650,000	1,239,255,000
-	-	-	937,630,000	1,595,340,000
42,138,517,000	36,871,789,500	-	36,375,432,424	115,385,738,924
17,566,092,000	11,597,790,000	15,426,970,500	8,080,837,000	52,671,689,500
1,467,827,500	1,857,765,000	1,718,476,000	1,834,961,000	6,879,029,500
5,141,243,600	3,949,313,000	2,301,961,000	3,647,025,000	15,039,542,600
810,169,000	191,167,500	195,500,000	1,044,380,000	2,241,216,500
665,010,000	156,862,500,000	166,850,000	232,924,510	158,227,284,510
1,199,696,700	246,040,750,000	396,822,400		248,389,326,600
-	-	400,000,000	-	400,000,000
-	-	347,262,350,000	-	347,262,350,000
652,272,407,450	1,247,887,214,160	1,035,085,875,929	668,018,375,809	3,758,312,323,333
1,601,570,000	58,656,747,250	46,964,903,000	56,806,039,088	166,038,676,838

## Lampiran 2 Program Dan Kegiatan Pro-Poor Pada Prioritas 2

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi	1. Pembangunan jalan dan jembatan	1. Perencanaan pembangunan jalan	TL	-
		2. Pembangunan jalan	TL	132,087,165,500
		3. Perencanaan pembangunan jembatan	TL	4,708,817,500
		5. Pembangunan jembatan	TL	-
	2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	TL	4,131,984,000
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	TL	9,069,735,500
	4. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Pengembangan sistem distribusi air minum	TL	4,062,399,580
		2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	TL	277,903,100
	5. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Perencanaan pengembangan infrastruktur	TL	2,906,765,153
	6. Pembangunan infrastruktur perdesaan	1. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	TL	7,894,613,750
		2. Pembangunan sarana dan prasarana gedung	TL	37,228,652,450
		3. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan pada kawasan terisolir dan kepulauan	TL	10,051,683,850
	7. Pengembangan perumahan	1. Pengembangan rumah sehat sederhana	L	-
	8. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	TL	1,333,494,150
		2. Perencanaan pembangunan reservoir	TL	1,881,600,000
		3. Perencanaan normalisasi saluran sungai	TL	1,083,934,600
		4. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	TL	8,696,863,250
		5. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	TL	20,236,435,535
		6. Pemberdayaan petani pemakai air	L + TL	2,179,783,775
		7. Pembangunan jaringan irigasi	TL	30,225,253,840

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
32,409,263,900	22,471,455,000	11,701,500,000	14,258,304,500	80,840,523,400
776,543,326,000	897,019,672,500	568,241,618,651	526,433,960,000	2,900,325,742,651
-	8,112,988,000	1,314,868,000	4,193,858,000	18,330,531,500
-	63,800,000,000	99,561,936,000	138,450,000,000	301,811,936,000
38,988,096,000	33,612,110,000	14,218,000,000	29,917,000,000	120,867,190,000
522,369,794,200	269,517,807,400	167,856,229,900	126,972,510,676	1,095,786,077,676
52,226,389,456	51,700,439,796	35,500,000,000	36,305,000,000	179,794,228,832
2,464,288,300	10,789,621,900	2,750,000,000	920,000,000	17,201,813,300
6,665,267,179	3,692,295,979	16,963,000,000	20,880,053,979	51,107,382,290
35,160,057,000	130,367,451,000	25,087,580,100	54,224,351,500	252,734,053,350
213,089,113,624	319,582,463,500	176,639,335,750	142,438,366,000	888,977,931,324
10,020,396,549	12,525,000,000	400,000,000	-	32,997,080,399
244,086,858,132	256,552,540,900	80,666,397,468	54,425,069,800	635,730,866,300
5,137,945,506	5,904,377,750	3,996,283,750	3,852,278,183	20,224,379,339
1,355,600,000	2,988,870,000	8,541,750,000	5,115,780,000	19,883,600,000
-	853,000,000	1,507,000,000	5,509,227,080	8,953,161,680
8,268,778,000	8,405,838,000	7,751,598,000	8,365,840,000	41,488,917,250
73,168,327,600	162,516,956,350	124,441,501,342	112,906,659,817	493,269,880,644
2,818,231,300	3,350,765,700	2,775,746,000	3,572,915,000	14,697,441,775
210,396,213,400	149,624,465,100	46,776,247,636	48,773,141,020	485,795,320,996

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
		8.Pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi (WISMP)	TL	311,488,850	
		9.Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah provinsi (WISMP)	TL	-	
		10.Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai (WISMP)	TL	-	
	9.Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1.Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	TL	20,921,400,000	
	10.Pengendalian banjir	1.Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	TL	-	
		2.Pembangunan prasarana pengaman pantai	TL	-	
	11.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	1.Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	TL	7,820,737,000	
	12.Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.Survey potensi sumber energi alternative	TL	-	
		2.Pembangunan Listrik Perdesaan	TL	938,472,500	
	13.Perlindungan dan Konservasi SDA	1.Pengelolaan kawasan Ekosistem Leuser	TL	-	
		2.Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	TL	-	
		3.Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	TL	-	
	14.Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.Pengembangan desa model	TL	-	
<b>Total</b>				308,049,183,883	
<b>Manfaat Langsung</b>				-	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
60,350,000	563,600,000	1,107,487,000	664,160,000	2,707,085,850
14,866,000	48,147,500	382,335,000	309,340,000	754,688,500
219,430,000	375,050,000	239,077,500	25,420,000	858,977,500
15,264,304,000	12,235,800,000	17,836,400,000	33,574,065,000	99,831,969,000
-	225,296,791,525	87,788,456,128	75,362,250,226	388,447,497,879
-	83,527,545,800	47,499,655,300	65,164,006,174	196,191,207,274
-	7,820,737,000	-	-	15,641,474,000
-	217,850,000	-	55,276,000	273,126,000
13,304,165,600	33,610,500,000	11,286,140,000	25,998,180,000	85,137,458,100
-	1,000,000,000	-	2,000,000,000	3,000,000,000
-	1,600,500,000	204,180,000	176,600,000	1,981,280,000
-	1,719,050,000	204,200,000	95,000,000	2,018,250,000
-	871,340,000	120,132,500	144,500,000	1,135,972,500
2,264,031,061,746	2,782,275,030,700	1,563,358,656,025	1,541,083,112,955	8,458,797,045,309
244,086,858,132	256,552,540,900	80,666,397,468	54,425,069,800	635,730,866,300



### Lampiran 3 Program Dan Kegiatan Pro-Poor Pada Prioritas 3

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
3. Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar	1. Pendidikan anak usia dini	1. Pembangunan gedung sekolah	TL	3,703,630,000	
		2. Penambahan ruang kelas sekolah	TL	-	
		3. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	TL	-	
		4. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	L + TL	-	
		5. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	TL	1,204,000,000	
		6. Pengadaan mebeluer sekolah	TL	-	
		7. Pengadaan perlengkapan sekolah	TL	-	
		8. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	TL	-	
		9. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas guru	TL	-	
		10. Pengembangan pendidikan anak usia dini	TL	-	
		11. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	TL	561,184,000	
		12. Pembangunan ruang serba guna/ aula	TL	-	
		13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	TL	-	
	2. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1. Pembangunan gedung sekolah	TL	-	
		2. Penambahan ruang kelas sekolah	TL	3,024,336,000	
		3. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	TL	-	
		4. Pembangunan ruang serba guna/ aula	TL	9,779,281,983	
		5. Pembangunan ruang ibadah	TL	-	
		6. Pembangunan perpustakaan sekolah	TL	-	
		7. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	TL	-	
		8. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	TL	7,268,267,060	
		9. Pengadaan mebeluer sekolah	TL	-	
		10. Pengadaan perlengkapan sekolah	TL	-	
		11. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	TL	-	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
56,825,342,610	52,260,527,571	21,623,601,600	19,153,796,000	153,566,897,781
-	-	7,315,338,272	9,717,594,000	17,032,932,272
-	-	184,260,000	89,144,000	273,404,000
-	-	-	30,000,000	30,000,000
3,968,049,300	1,885,885,000	1,427,500,000	3,482,676,000	11,968,110,300
2,175,888,103	1,802,000,000	1,490,380,000	1,953,015,000	7,421,283,103
-	45,500,000	95,227,496	195,000,000	335,727,496
-	-	214,865,000	818,703,000	1,033,568,000
-	-	-	162,640,000	162,640,000
-	-	1,590,229,400	2,105,250,000	3,695,479,400
2,143,444,000	3,674,900,000	40,000,000	387,220,000	6,806,748,000
-	-	461,085,000	-	461,085,000
-	-	9,996,900	-	9,996,900
96,267,928,674	245,379,633,108	15,737,637,771	17,106,434,000	374,491,633,553
34,487,394,475	-	60,329,652,767	66,943,129,315	164,784,512,557
-	-	18,012,246,346	7,633,390,200	25,645,636,546
-	-	1,744,038,000	857,220,000	12,380,539,983
-	-	2,289,975,500	1,203,287,875	3,493,263,375
-	-	2,579,518,980	1,936,492,000	4,516,010,980
8,201,227,200	-	1,327,762,000	2,738,856,800	12,267,846,000
18,264,879,349	17,660,480,455	7,159,600,000	11,030,360,000	61,383,586,864
10,692,736,346	14,280,399,500	21,640,350,000	19,922,410,000	66,535,895,846
-	322,330,000	3,850,617,200	5,705,670,989	9,878,618,189
-	-	4,044,310,843	4,390,808,404	8,435,119,247

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
		12.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	TL	-	
		13.Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	TL	-	
		14.Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	TL	-	
		15.Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	TL	-	
		16.Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP	L	-	
		17.Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/MTs	L + TL	7,906,091,700	
		18.Penyelenggaraan paket A setara SD	TL	-	
		19.Penyelenggaraan paket B setara SMP	TL	-	
		20.Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	TL	1,630,370,000	
		21.Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	TL	-	
		22.Penyediaan beasiswa transisi	TL	-	
		23.Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	TL	862,812,500	
		24.Pengembangan kurikulum dan pembinaan kesiswaan SD/MI	TL	-	
		25.Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	TL	1,222,485,000	
		26.Biaya pendidikan gratis SD/MI (sharing kab/kota)	L	228,428,000	
		27.Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	L + TL	-	
		28.Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	TL	-	
		29.Pembinaan pendidikan berwawasan keunggulan SD/MI	TL	-	
		30.Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	TL	-	
		31.Pengadaan pakaian seragam sekolah	TL	-	
		32.Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	TL	-	
		33.Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	TL	-	
		34.Penyediaan biaya operasional madrasah	TL	-	
		35.Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi	TL	-	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
-	-	4,524,296,800	7,976,837,840	12,501,134,640
-	-	246,240,000	660,464,000	906,704,000
-	-	-	105,560,000	105,560,000
-	-	-	36,000,100	36,000,100
-	-	970,000,000	1,415,737,000	4,645,737,000
1,526,158,000	4,556,140,000	5,085,800,000	4,767,173,064	23,841,362,764
-	-	190,258,000		190,258,000
-	-	2,109,828,000	60,000,000	2,169,828,000
4,773,198,484	5,287,015,284	4,117,543,000	5,891,274,000	21,699,400,768
-	-	-	634,340,000	634,340,000
151,509,180,000	182,290,200,000	208,587,800,000	208,350,000,000	750,737,180,000
988,021,000	513,046,000	789,000,000	1,000,000,000	4,152,879,500
-	-	46,200,000	1,792,976,040	1,839,176,040
7,129,143,900	-	-	-	8,351,628,900
-	-	-	-	228,428,000
-	3,068,000,000	2,175,170,165	-	5,243,170,165
-	164,100,000	-	-	164,100,000
435,667,500	665,410,000	22,238,000	-	1,123,315,500
-	-	34,008,000	-	34,008,000
-	-	454,000,000	-	454,000,000
-	-	334,454,400	-	334,454,400
-	-	370,000,000	-	370,000,000
-	-	75,000,000	-	75,000,000
349,920,000	-	94,000,000	-	443,920,000

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
3. Pendidikan menengah		1. Pembangunan gedung sekolah	TL	15,974,558,000
		2. Penambahan ruang kelas sekolah	TL	-
		3. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain)	TL	318,700,500
		4. Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	TL	-
		5. Pembangunan ruang serba guna/aula	TL	-
		6. Pembangunan ruang ibadah	TL	-
		7. Pembangunan ruang perpustakaan sekolah	TL	-
		8. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	TL	-
		9. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	TL	48,000,000
		10. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	L + TL	3,467,060,000
		11. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	TL	646,041,500
		12. Pengadaan mebeluer sekolah	TL	-
		13. Pengadaan perlengkapan sekolah	TL	6,393,892,560
		14. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	TL	-
		15. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	TL	-
		16. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	TL	-
		17. Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	TL	-
		18. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah	TL	-
		19. Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	TL	-
		20. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi	TL	-
		21. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	TL	-
		22. Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	TL	-
		23. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	TL	3,896,740,000
		24. Penyelenggaraan paket C setara SMU	TL	-
		25. Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	TL	2,974,394,000
		26. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	TL	271,800,000

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
196,214,113,047	250,185,998,933	21,699,025,340	12,481,474,000	496,555,169,320
-	-	53,195,244,328	36,901,587,516	90,096,831,844
-	-	22,732,183,176	16,001,495,800	39,052,379,476
-	-	404,736,600	2,843,500,000	3,248,236,600
-	-	2,982,014,000	2,935,192,000	5,917,206,000
-	-	4,195,768,068	2,379,309,000	6,575,077,068
-	-	3,743,009,000	1,528,342,000	5,271,351,000
-	-	-	840,350,000	840,350,000
-	-	994,404,000	2,978,272,490	4,020,676,490
4,217,248,000	7,157,652,000	322,392,000	2,954,073,544	18,118,425,544
4,114,760,000	50,031,196,901	19,059,654,979	25,478,891,924	99,330,545,304
	10,040,792,000	10,098,390,830	8,557,621,614	28,696,804,444
41,151,275,925	2,411,545,400	1,045,735,740	1,988,600,000	52,991,049,625
-	-	1,932,883,000	4,086,424,500	6,019,307,500
-	139,875,000	-	73,704,000	213,579,000
-	-	6,851,628,000	4,189,068,986	11,040,696,986
-	-	253,843,200	659,000,000	912,843,200
-	-	949,249,200	-	949,249,200
-	-	-	100,000,000	100,000,000
-	-	-	39,000,000	39,000,000
-	-	282,048,000	-	282,048,000
-	260,000,000	-	-	260,000,000
11,067,770,330	22,155,478,046	7,174,039,253	6,549,100,000	50,843,127,629
-	-	2,312,778,000	93,624,000	2,406,402,000
1,891,770,000	3,477,445,000	1,317,085,300	4,063,824,788	13,724,519,088
2,995,609,500	6,189,425,000	601,315,689	2,368,500,000	12,426,650,189

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
		27.Peningkatan sarana dan prasarana SMA/MA berwawasan keunggulan	TL	-	
		28.Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	TL	569,188,800	
		29.Pembinaan dan peningkatan kapasitas siswa SMA/MA berwawasan keunggulan	TL	-	
		30.Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan; terpencil dan kepulauan	TL	1,315,141,600	
		31.Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	L	23,400,000	
		32.Pengadaan alat rumah tangga sekolah	TL	-	
		33.Pemeliharaan rutin/berkala alat praktek dan peraga siswa	TL	-	
		34.Penelitian minat siswa memasuki sekolah kejuruan	TL	-	
	4.Pendidikan non formal	1.Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	TL	2,803,975,500	
		2.Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	TL	6,920,806,800	
		3.Pengembangan pendidikan keaksaraan	TL	657,420,800	
		4.Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	TL	1,249,900,000	
		5.Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	TL	2,905,859,000	
		6.Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	TL	797,796,000	
		7.Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	TL	-	
	5.Pendidikan luar biasa	1.Pembangunan gedung sekolah	TL	-	
		2.Pengadaan perlengkapan sekolah	TL	-	
		3.Pengembangan kreatifitas guru TK/SLB	TL	-	
		3.Penyediaan biaya operasional SDLB/SMPLB/SMALB dan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi	TL	-	
		4.Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	TL	-	
	6.Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi serta kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan	1.Pengadaan buku	TL	1,434,627,000	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
1,563,116,000	758,417,000	-	-	2,321,533,000
1,183,416,650	1,105,522,500	784,045,000	216,000,000	3,858,172,950
-	-	471,800,000	750,000,000	1,221,800,000
-	-	-	-	1,315,141,600
46,800,000	140,000,000	-	-	210,200,000
-	-	45,850,000	-	45,850,000
-	-	70,000,000	-	70,000,000
-	140,000,000	-	-	140,000,000
3,012,728,400	4,489,496,502	1,358,519,500	3,478,090,077	15,142,809,979
7,365,195,400	7,453,269,995	445,063,780	1,412,000,000	23,596,335,975
5,149,022,000	1,168,997,900	240,750,000	238,565,000	7,454,755,700
1,838,000,000	500,000,000	165,585,000	450,000,000	4,203,485,000
9,916,868,490	7,750,024,000	8,612,980,700	2,892,277,450	32,078,009,640
-	1,078,710,000	60,000,000	269,754,000	2,206,260,000
529,920,000	1,873,550,000	410,660,000	-	2,814,130,000
-	589,888,000	162,025,500	1,314,720,000	2,066,633,500
-	-	-	96,000,000	96,000,000
-	5,103,746,900	646,450,000	337,320,000	6,087,516,900
-	-	2,500,000,000	3,545,000,000	6,045,000,000
-	3,803,450,000	486,500,000	-	4,289,950,000
1,459,715,400	-	-	85,000,000	2,979,342,400



Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
		2.Penyediaan bahan dan alat laboratorium	TL	485,089,500	
		3.Pengadaan fasilitas pendukung proses mengajar	TL	-	
		4.Pembangunan fasilitas pendukung belajar mengajar	TL	-	
		5.Penyediaan meubeleu ruang kuliah	TL	938,100,000	
		6.Pembangunan/pengadaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar	TL	5,423,108,500	
		7.Pembangunan ruang belajar	TL	5,467,072,995	
		8.Jasa administrasi dan keuangan	TL	137,062,500	
		9.Peningkatan sarana perguruan tinggi negeri/ swasta	TL	66,953,500	
		10.Penulisan buku dan bahan ajar	TL	1,412,600,000	
		11.Penyediaan bahan dan alat laboratorium	TL	4,946,550,000	
		12.Basiswa dan peningkatan mutu dosen	TL	15,241,946,000	
		13.Basiswa dan peningkatan mutu mahasiswa	TL	5,631,700,000	
		14.Pengembangan kegiatan kemahasiswaan	TL	2,827,133,375	
		15.Pengembangan program studi	TL	3,875,761,000	
		16.Penelitian dosen	TL	1,430,725,000	
		17.Pengabdian masyarakat	TL	1,327,000,000	
		18.Pendamping hibah kompetisi	TL	4,063,510,000	
		19.Monitoring, evaluasi dan pelaporan	TL	231,264,500	
		20.Penyediaan meubeleu perpustakaan	TL	502,796,129	
		21.Penunjang sekolah kedinasan	TL		
		7.Peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah	1.Pembinaan terhadap pimpinan dan tgg. Dayah	TL	-
2.Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidikan	TL		-		
8.Pemberdayaan santri	1.Pembinaan kompetensi/ekstra kurikuler santri	TL	-		
	2.Pembinaan dan pengembangan proses pembelajaran	TL	-		
	3.Penyediaan beasiswa transisi (anak yatim/ miskin)	L	-		
	4.Pembinaan bakat dan minat santri	TL	-		
	5.Pelatihan komputer santri dayah	TL	-		
	6.Pelatihan lifeskill santri, jurnalistik dan penerbitan berkala majalah/jurnal dayah	TL	-		
	7.Pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah	TL	-		

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
	-	-	8,169,005,279	8,654,094,779
9,386,658,800	-	-		9,386,658,800
11,730,835,050	-	-	3,337,040,000	15,067,875,050
1,198,958,640	-	-	-	2,137,058,640
-	-	-	-	5,423,108,500
-	-	-	-	5,467,072,995
-	-	-	-	137,062,500
-	-	-	-	66,953,500
1,501,674,500	-	-	-	2,914,274,500
7,224,214,150	-	-	-	12,170,764,150
20,005,170,000	-	-	-	35,247,116,000
6,918,500,000	-	-	-	12,550,200,000
5,922,442,500	-	-	-	8,749,575,875
6,834,370,000	-	-	-	10,710,131,000
1,725,500,000	-	-	-	3,156,225,000
3,424,360,000	-	-	-	4,751,360,000
5,962,196,200	-	-	-	10,025,706,200
529,443,000	-	-	-	760,707,500
-	-	-	-	502,796,129
413,869,810	-	-	-	413,869,810
-	12,054,816,000	11,445,772,000	15,908,565,000	39,409,153,000
-	-	-	110,200,000	110,200,000
-	589,942,500	405,500,000	605,320,000	1,600,762,500
-	-	-	359,750,000	359,750,000
-	-	-	1,689,100,000	1,689,100,000
-	-	-	477,184,000	477,184,000
-	201,288,000	-	-	201,288,000
-	323,765,000	3,366,902,500	-	3,690,667,500
-	283,620,000	773,581,500	-	1,057,201,500

Kebijakan/ Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007		
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)		
	9.Pembinaan manajemen dayah	1.Pembinaan kelembagaan dan manajemen dayah	TL	1,285,554,000		
		2.Pembinaan usaha kesehatan dayah	TL	-		
		3.Pelatihan manajemen dayah dan manajemen asset dayah	TL	-		
		4.Pelatihan usaha kesehatan dayah (UKD)	TL	-		
	10.Pendidikan dayah	1.Pembinaan kelembagaan dayah dan pengembangan dayah	TL	-		
		2.Penyediaan kitab/buku pelajaran bagi dayah/ Pesantren	L + TL	3,706,977,600		
		3.Pengadaan alat praktek dan peraga santri	TL	1,152,600,000		
		4.Penyebarluasan dan sosialisasi lulusan Dayah/ Pesantren	TL	1,000,778,000		
		5.Pembinaan kreativitas dayah/pasantren	TL	2,260,094,300		
		6.Pelatihan pembina kaligrafi	TL	-		
		7.Pembinaan santri	TL	-		
			8.Pembinaan manajemen dayah	TL	-	
			9.Survey dayah	TL	-	
10.Pelatihan komputer untuk santri dayah			TL	-		
11.Pengembangan kurikulum dayah			TL	-		
12.Peningkatan sarana dan prasarana dayah			TL	-		
13.Penyediaan daya operasional dayah			TL	-		
11.Peningkatan sarana dan prasarana dayah		1.Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah	TL	-		
		2.Pembangunan dayah bertaraf internasional	TL	-		
12.Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		1.Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	TL	-		
		2.Pembangunan gedung perpustakaan	TL	-		
	3.Pengembangan binat dan budaya baca	TL	-			
<b>TOTAL</b>				153,474,565,202		
<b>Manfaat Langsung</b>				251,828,000		

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
-	-	-	86,000,000	1,371,554,000
-	-	-	85,440,000	85,440,000
-	233,345,000	225,780,000		459,125,000
-	181,984,000	222,076,000		404,060,000
282,802,000	-	80,000,000	94,530,000	457,332,000
5,476,797,200	10,115,562,000	4,069,200,000	-	23,368,536,800
2,154,140,000	3,937,620,000	2,247,200,000	-	9,491,560,000
-	-	-	-	1,000,778,000
-	-	-	-	2,260,094,300
149,515,000	138,365,000	257,220,000	-	545,100,000
658,900,000	241,600,000	-	-	900,500,000
142,515,000	-	-	-	142,515,000
581,230,000	-	-	-	581,230,000
245,010,000	-	224,070,000	-	469,080,000
517,395,400	-	-	-	517,395,400
130,811,503,500	-	-	-	130,811,503,500
-	9,906,240,000	-	-	9,906,240,000
-	155,721,175,440	63,115,955,000	-	218,837,130,440
-	1,055,520,000	5,695,720,000	-	6,751,240,000
-	486,000,000	-	-	486,000,000
-	2,333,891,000	363,420,000	-	2,697,311,000
-	-	334,300,000	-	334,300,000
919,513,508,833	1,119,664,781,935	674,828,383,623	596,351,276,595	3,463,832,516,188
2,306,800,000	140,000,000	970,000,000	3,104,837,000	6,773,465,000

## Lampiran 4 Program Dan Kegiatan Pro-Poor Pada Prioritas 4

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
4. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Obat dan perbekalan kesehatan	1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	L + TL	7,565,193,323	
		2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	L + TL	163,400,000	
		3. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	L	105,400,000	
		4. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	TL	105,400,000	
		5. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	TL	-	
	2. Upaya kesehatan masyarakat	1. Revitalisasi sistem kesehatan	TL	-	
		2. Peningkatan kesehatan masyarakat	TL	117,155,000	
		3. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	TL	645,500,000	
		4. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	TL	272,560,000	
		5. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	TL	3,091,000,000	
		6. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	TL	6,528,231,500	
		7. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	L + TL	-	
		8. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	TL	-	
	3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	TL	125,898,000	
		2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	L + TL	198,001,800	
	4. Perbaikan gizi masyarakat	1. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	L + TL	2,251,395,000	
		2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	L + TL	-	
	5. Pengembangan lingkungan sehat	1. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	L + TL	2,770,300,000	
	6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	L + TL	254,700,000	
		2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	L + TL	315,670,000	
		3. Peningkatan imunisasi	L + TL	25,935,000	
		4. Peningkatan surveillance dan penanggulangan wabah	L + TL	59,235,000	
		5. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	L + TL	93,000,000	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
4,064,000,618	8,147,201,680	991,146,689	492,575,000	21,260,117,310
-	357,124,000	-	-	520,524,000
-	-	-	-	105,400,000
-	-	-	-	105,400,000
-	318,808,000	-	-	318,808,000
-	2,687,150,000	200,000,000	269,215,000	3,156,365,000
517,501,000	2,528,260,000	1,425,350,000	6,944,282,484	11,532,548,484
332,300,000	1,000,000,000	150,000,000	278,722,500	2,406,522,500
-	102,000,000	250,000,000	271,152,500	895,712,500
-	24,054,187,750	41,665,956,501	119,649,500	68,930,793,751
-	8,412,435,000	1,594,950,000	676,700,000	17,212,316,500
-	-	834,602,353	-	834,602,353
200,000,000	2,247,600,000	-	-	2,447,600,000
68,400,000	998,450,000	136,920,000	150,000,000	1,479,668,000
109,400,000	850,630,000	100,000,000	138,509,500	1,396,541,300
806,250,000	4,549,882,500	596,100,000	681,229,025	8,884,856,525
-	83,000,000	90,000,000	-	173,000,000
3,585,480,000	5,725,100,000	2,737,229,412	363,260,000	15,181,369,412
284,400,000	3,182,022,500	300,000,000	1,379,900,000	5,401,022,500
320,610,000	1,516,244,600	200,000,000	182,750,000	2,535,274,600
227,575,000	1,202,720,500	75,000,000	92,955,000	1,624,185,500
348,655,600	1,426,808,700	100,000,000	136,780,000	2,071,479,300
111,240,000	148,686,000	-	-	352,926,000

Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
	7.Pelayanan medis	1.Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis	TL	-	
		2.Peningkatan pelayanan gawat darurat	TL	-	
		3.Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak	TL	-	
		4.Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa	TL	-	
		5.Peningkatan pelayanan rawat jalan	TL	-	
		6.Peningkatan pelayanan rawat inap	TL	-	
		7.Peningkatan pelayanan asuhan keperawatan	TL	-	
		8.Peningkatan pelayanan gigi dan mulut	TL	-	
		9.Peningkatan pelayanan haemodialisasi	TL	-	
		10.Peningkatan pelayanan bedah sentral (COT)	TL	-	
		11.Peningkatan pelayanan rawat jantung	TL	-	
		12.Peningkatan pelayanan anatesi dan reaminasi	TL	-	
	8.Pelayanan penunjang medis/non medis	1.Peningkatan pelayanan gizi	TL	-	
		2.Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah	TL	-	
		3.Peningkatan pelayanan laundry	TL	-	
		4.Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi	TL	-	
		5.Peningkatan pelayanan rekam medis	TL	-	
		6.Peningkatan pelayanan radiologi	TL	-	
		7.Peningkatan pelayanan farmasi	TL	-	
		8.Peningkatan pelayanan patologi anatomi	TL	-	
		9.Peningkatan pelayanan patologi klinik	TL	-	
	9.Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.Pembangunan rumah sakit	TL	-	
		2.Pengadaan obat-obatan rumah sakit	TL	6,151,775,167	
		3.Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	TL	316,599,640	
		4.Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	TL	-	
		5.Rehabilitasi bangunan rumah sakit	TL	773,545,000	
		6.Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	TL	25,588,995,085	
		7.Pengembangan tipe rumah sakit	TL	175,495,000	
		8.Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP kelas I, II, dan III)	TL	1,789,168,000	
		9.Pengadaan meubeleur rumah sakit	TL	180,375,200	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
-	110,260,000	37,635,000	135,250,000	283,145,000
-	563,168,960	666,981,589	197,356,000	1,427,506,549
-	2,702,895,000	5,650,000	-	2,708,545,000
-	2,518,515,000	27,830,000	294,676,340	2,841,021,340
-	599,876,600	257,942,500	7,084,500,860	7,942,319,960
-	16,192,340,520	9,566,978,753	6,370,018,579	32,129,337,852
-	204,000,000	12,000,000	-	216,000,000
-	1,321,706,000	762,465,120	-	2,084,171,120
-	1,640,034,700	1,703,686,950	-	3,343,721,650
-	8,906,220,000	-	-	8,906,220,000
-	142,900,000	6,868,736,000	-	7,011,636,000
-	855,287,400	1,114,192,785	-	1,969,480,185
-	1,897,773,650	1,726,608,494	228,000,000	3,852,382,144
-	355,600,000	230,400,000	525,120,000	1,111,120,000
-	272,454,500	397,737,500	364,300,200	1,034,492,200
-	310,277,900	1,823,454,165	153,990,000	2,287,722,065
-	1,670,495,400	1,025,653,400	617,612,000	3,313,760,800
-	41,031,761,800	970,435,455	-	42,002,197,255
-	1,907,537,800	2,365,378,886	-	4,272,916,686
-	2,320,772,100	72,859,526	-	2,393,631,626
-	957,998,700	1,328,313,935	-	2,286,312,635
71,424,119,650	64,848,279,884	60,819,497,529	91,386,136,500	288,478,033,563
-	3,531,045,819	2,108,193,729	1,285,750,596	13,076,765,311
-	3,034,760,500	767,311,320	1,538,114,340	5,656,785,800
-	4,027,638,250	4,791,769,500	4,670,950,000	13,490,357,750
-	-	-	97,500,000	871,045,000
44,947,046,000	47,488,214,670	59,676,445,097	33,198,973,445	210,899,674,297
-	811,362,250	1,865,649,599	179,550,000	3,032,056,849
-	9,690,750,000	-	-	11,479,918,000
-	139,649,000	-	-	320,024,200



Kebijakan/ Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
		10.Pengembangan ruang gawat darurat	TL	259,668,000
		11.Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	TL	1,104,676,925
		12.Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah	TL	-
	10.Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1.Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	L + TL	-
		2.Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	TL	-
		3.Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic	TL	-
	11.Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	TL	758,765,500
		2.Penyuluhan kesehatan anak balita	TL	-
	12.Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1.Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	TL	206,270,000
	13.Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	L	176,170,000
	14.Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	1.Pembangunan puskesmas	TL	-
		2.Pembangunan puskesmas pembantu	TL	426,640,000
		3.Pembangunan posyandu	TL	-
		4.Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	TL	-
		5.Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	TL	145,000,000
		6.Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	TL	-
	15.Program Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi	1.Pengadaan buku	TL	73,864,681
		2.Pengadaan bahan dan alat laboratorium	TL	147,814,464
		3.Pengadaan meubeleur ruang kuliah	TL	38,850,000
		4.Pengadaan meubeleur ruang laboratorium	TL	28,775,498
		5.Penyediaan Meubeluer ruang kuliah/lab/ Perpustakaan	TL	-
		6.Beasiswa dosen	TL	12,000,000
		7.Pembangunan ruang belajar	TL	1,480,017,776
		8.Penunjang kesehatan kedinasan	TL	18,677,580
9.Pembangunan fasilitas pendukung proses belajar mengajar		TL	-	
10.Pengembangan program studi		TL	-	
11.Penelitian dosen		TL	-	
12.Penunjang sekolah kedinasan		TL	-	
<b>Total</b>				64,541,118,139
<b>Manfaat Langsung</b>				281,570,000

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
-	-	-	-	259,668,000
-	-	-	-	1,104,676,925
-	1,988,000,000	-	-	1,988,000,000
659,410,000	16,246,350,000	243,612,604,641	400,380,774,122	660,899,138,763
-	248,300,000	-	-	248,300,000
-	739,000,000	-	-	739,000,000
-	-	150,000,000	182,330,000	1,091,095,500
737,445,000	3,864,100,000	-	-	4,601,545,000
505,500,000	1,200,000,000	100,000,000	135,645,000	2,147,415,000
767,000,000	2,764,860,000	150,000,000	181,100,000	4,039,130,000
15,582,521,000	16,528,391,909	21,457,078,328	28,438,861,596	82,006,852,833
5,061,502,000	7,033,869,343	9,592,380,833	1,597,159,000	23,711,551,176
31,486,053,200	36,228,859,741	25,847,460,460	29,304,964,000	122,867,337,401
8,298,598,000	7,068,542,960	8,123,468,277	7,648,946,500	31,139,555,737
-	1,297,013,200	1,515,500,000	-	2,957,513,200
-	5,644,480,505	3,250,821,330	4,827,000,000	13,722,301,835
-	54,673,055	-	-	128,537,736
125,529,660	1,044,975,811	-	-	1,318,319,935
-	-	-	-	38,850,000
-	-	-	-	28,775,498
-	82,976,200	-	-	82,976,200
-	-	-	-	12,000,000
-	-	-	-	1,480,017,776
-	-	-	-	18,677,580
1,436,550,340	2,692,028,600	-	-	4,128,578,940
237,920,000	713,911,300	-	-	951,831,300
-	90,240,000	-	-	90,240,000
-	633,405,925	-	-	633,405,925
192,245,000	395,755,866,182	526,240,375,656	633,202,259,587	1,811,984,626,632
767,000,000	2,764,860,000	150,000,000	181,100,000	4,144,530,000

## Lampiran 5 Program Dan Kegiatan Pro-Poor Pada Prioritas 5

Kebijakan/ Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
5. Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya	1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	1. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	L	202,060,000	
		2. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	L	219,672,000	
		3. Pemberdayaan ketrampilan berusaha komunitas adat terpencil	L	4,941,960,000	
		4. Pelatihan ketrampilan bagi lansia	L	59,040,000	
		5. Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan ekonomi sosial (WRSE)	L	8,285,515,000	
		6. Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga rentan	L	6,617,900,000	
		7. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya	TL	2,258,320,000	
		8. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	L	436,852,500	
		9. Sosialisasi program pemberdayaan perempuan	TL	183,435,000	
		10. Sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin	L	14,929,000	
		11. Sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin	L	14,929,000	
	2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	TL	374,905,000	
		2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	TL	565,023,075	
		3. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	TL	106,321,670	
		4. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	TL	11,598,120,000	
		5. Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat	L	1,192,915,600	
		6. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Panti	TL	682,935,000	
		7. Pemulangan orang terlantar/terdampar	L	-	
		8. Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (reintegrasi)	L	-	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
428,462,500	1,716,453,000	-	1,500,700,000	3,847,675,500
938,313,500	645,986,000	-	540,300,000	2,344,271,500
746,850,000	20,433,410,800	-	2,561,614,000	28,683,834,800
1,508,491,000	888,380,000	12,100,000	220,300,000	2,688,311,000
4,031,030,000	952,352,500	-	491,718,000	13,760,615,500
6,094,910,000	2,403,910,000	493,360,000	1,126,260,000	16,736,340,000
986,380,000	430,272,000	-	-	3,674,972,000
-	-	-	-	436,852,500
-	-	-	-	183,435,000
69,452,500	67,176,000	-	-	151,557,500
69,452,500	67,176,000	-	-	151,557,500
-	14,592,500,000	15,059,074,475	21,627,383,982	51,653,863,457
795,025,400	806,000,900	122,325,000	195,860,000	2,484,234,375
439,346,000	396,875,500	-	261,160,000	1,203,703,170
7,544,162,000	24,248,533,565	18,324,649,500	11,417,500,000	73,132,965,065
1,610,910,000	818,327,000	-	1,404,455,000	5,026,607,600
925,850,100	2,376,976,500	89,414,000	271,546,000	4,346,721,600
150,250,500	120,000,000	45,750,000	100,000,000	416,000,500
35,958,310,000	25,575,000,000	20,050,000,000	90,350,000	81,673,660,000

Kebijakan/ Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
		9.Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	L	101,710,000
		10.Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan; anak cacat, anak nakal	L	191,525,000
		11.Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi korban tindak kekerasan (KTK)	TL	71,570,000
		12.Sosialisasi bahaya narkoba berbasis masyarakat	TL	16,960,500
		13.Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan; anak cacat, anak nakal	L	288,922,000
		14.Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana	L	741,300,000
		15.Sosialisasi pelaksanaan KIE konseling bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	L	2,566,450,000
		16.Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	TL	-
	3.Pembinaan anak terlantar	1.Pelayanan dan perlindungan sosial anak	L	-
		2.Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	L	367,500,000
		3.Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar	L	196,830,000
	4.Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1.Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	L	1,076,457,000
		2.Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	L	140,953,000
		3.Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	L	194,260,000
		4.Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	TL	3,636,699,000
		5.Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks psikotik	L	439,977,200
		6.Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma	L	144,745,000
		7.Pelatihan dan pembinaan bagi penyandang cacat tuna netra	L	493,046,600
		8.Pelatihan kewirausahaan usaha ekonomi produktif (UEP) dan kelompok usaha bersama (KUBE) penyandang cacat	L	536,155,000

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
-	-	-	-	101,710,000
-	-	-	-	191,525,000
91,580,000	-	-	-	163,150,000
100,406,000	32,855,100	-	-	150,221,600
-	-	-	-	288,922,000
868,143,000	941,139,000	-	-	2,550,582,000
-	-	-	-	2,566,450,000
24,040,000	-	-	-	24,040,000
724,587,000	3,930,816,000	183,975,000	1,365,550,000	6,204,928,000
3,103,465,100	2,300,703,500	-	-	5,771,668,600
357,584,000	333,930,000	-	-	888,344,000
5,262,981,271	10,442,834,500	3,398,733,750	7,740,745,200	27,921,751,721
-	-	-	-	140,953,000
-	-	-	-	194,260,000
-	-	-	-	3,636,699,000
-	-	-	-	439,977,200
-	-	-	-	144,745,000
-	-	-	-	493,046,600
-	-	-	-	536,155,000

Kebijakan/ Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)
	5. Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	L	563,488,500
		2. Pendidikan dan pelatihan cacat netra	L	111,040,000
		3. Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	L	429,550,000
		4. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah	L	696,600,000
		5. Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja	L	866,580,000
		6. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan	L	-
		7. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	L	43,905,000
		8. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	L	-
	6. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	L	369,320,000
		2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	L	225,955,500
		3. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi gelandangan dan pengemis	L	473,380,000
		4. Penyediaan sarana dan prasarana Penunjang pembinaan	TL	-
	7. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	TL	150,342,000
		2. Pemberdayaan karang taruna	TL	-
		3. Pelatihan petugas penyuluh sosial dan penyuluh sosial keliling	TL	-
		4. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	TL	409,111,000
		5. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	TL	126,540,000
		6. Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan bencana (tagana)	TL	46,940,000
		7. Pengembangan model kelembagaan perlindungan masyarakat	TL	-
		8. Fasilitasi kerjasama usaha pemda dengan organisasi/lembaga sosial masyarakat	TL	-
		9. Pengadaan sarana dan prasarana panti anak jalanan	L	-

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
921,325,848	1,775,028,000	881,342,000	821,704,000	4,962,888,348
114,020,000	184,256,000	102,486,000	135,300,000	647,102,000
954,081,650	1,116,618,500	1,149,270,000	1,352,860,000	5,002,380,150
1,100,694,375	1,230,888,000	275,923,500	317,600,000	3,621,705,875
588,382,450	758,559,400	1,554,687,500	1,465,122,000	5,233,331,350
-	2,347,000,000	1,460,881,000	1,591,700,000	5,399,581,000
-	-	-	-	43,905,000
-	1,157,500,000	-	-	1,157,500,000
474,568,000	288,597,800	-	550,570,000	1,683,055,800
334,690,000	306,108,900	-	-	866,754,400
455,462,000	373,107,700	-	-	1,301,949,700
11,687,615,600	-	-	-	11,687,615,600
213,595,000	464,983,000	-	169,830,000	998,750,000
436,805,000	1,581,560,000	-	2,415,610,000	4,433,975,000
-	615,552,525	102,150,000	223,300,000	941,002,525
-	-	-	-	409,111,000
359,537,000	367,975,000	-	-	854,052,000
433,432,000	389,776,000	-	-	870,148,000
435,720,000	307,403,500	-	-	743,123,500
15,024,000	36,059,250	-	-	51,083,250
440,051,000	-	-	-	440,051,000



Kebijakan/Prioritas Pembangunan	Pro Rakyat Miskin		Manfaat	2007	
	Program	Kegiatan	L/TL	Anggaran (Rp)	
	8.Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	TL	-	
		2.Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	TL	-	
		3.Pengembangan sistem informasi gender dan anak	TL	-	
		4.Penguatan komisi perlindungan anak	TL	-	
		5.Peningkatan kapasitas penguatan gugus tugas anti trafficking	TL	-	
<b>Total</b>				53,457,716,145	
<b>Manfaat Langsung</b>				33,230,493,900	

2008	2009	2010	2011	Total Anggaran (Rp)
Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
-	-	-	2,061,177,358	2,061,177,358
-	-	-	351,660,000	351,660,000
-	-	-	275,630,000	275,630,000
-	-	-	-	-
-	-	-	42,120,000	42,120,000
91,725,533,794	127,755,405,440	63,306,121,725	62,689,625,540	398,934,402,644
67,237,015,694	81,108,082,600	29,608,508,750	23,376,848,200	234,560,949,144

## Lampiran 6 Matriks Kesenjangan Kebijakan Pro-Poor Di Aceh Dan Road Map Kebijakan

No	Persoalan Kemiskinan	Tantangan	Faktor Penghambat	Kebijakan Pro-Poor	Kesenjangan
1	Persoalan terkait kemiskinan ekstrim (sangat miskin)	Jumlah kemiskinan ekstrim tidak terdata dengan lengkap	Tidak ada kriteria yang jelas tentang kemiskinan ekstrim  Keadaan rumah tangga miskin yang tidak memungkinkan model pemberdayaan ekonomi konvensional  Akses permodalan yang sangat tertutup bagi keluarga miskin jenis ekstrim  Kerentanan yang sangat tinggi	Bantuan langsung  <i>Social Security</i>  Penyediaan dan perbaikan Infrastruktur dasar di pedesaan  Akses modal bagi keluarga sangat miskin	Data  Bantuan langsung tidak sustainable
2	Persoalan kemiskinan pada rumah tangga miskin dan sangat miskin yang dipimpin oleh perempuan	Jumlah rumah tangga miskin dan sangat miskin yang dipimpin oleh perempuan yang tidak terdata dengan baik  Persoalan kemiskinan yang lebih kompleks  Komplikasi kemiskinan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan kepala keluarga yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kemiskinan  Perhatian dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal	Keadaan rumah tangga miskin yang tidak memungkinkan model pemberdayaan ekonomi konvensional  Akses permodalan yang sangat tertutup  Kerentanan yang sangat tinggi	Bantuan langsung  <i>Social Security</i>  Penyediaan dan perbaikan Infrastruktur dasar di pedesaan  Akses modal bagi keluarga sangat miskin	Data  Bantuan jenis pemberdayaan rumah tangga yang sering tidak dapat diakses  Penguasaan harta oleh perempuan masih diperdebatkan
3	Persoalan kemiskinan akibat ketiadaan tanah (kepemilikan lahan) bagi keluarga miskin kelompok petani penggarap	Jumlah petani penggarap tidak diketahui secara pasti – diduga jumlahnya cukup signifikan  Persoalan dengan kompetisi kebutuhan penggunaan lahan  Mahalnya biaya pengadaan lahan bagi petani penggarap  Perhatian dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal	Pengadaan lahan bagi petani miskin seringkali membutuhkan relokasi – relokasi sulit dilakukan  Pemilihan lahan yang sesuai membutuhkan waktu yang panjang	Registrasi Kepemilikan lahan  Penyediaan dan perbaikan Infrastruktur dasar di pedesaan	Jumlah petani penggarap yang tidak diketahui pasti  Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk pengadaan lahan bagi kemiskinan

No	Persoalan Kemiskinan	Tantangan	Faktor Penghambat	Kebijakan Pro-Poor	Kesenjangan
4	Persoalan kemiskinan di kelompok petani karena porsi nilai tambah produksi yang kecil bagi petani	<p>Kecilnya skala produksi petani (luas area tanam yang kecil, produksi dan kesinambungan produksi yang tidak terjamin, dsb)</p> <p>Mahalnya biaya untuk membangun industri pengolahan produk pertanian</p> <p>Perhatian dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal</p> <p>Lemahnya keinginan perbankan untuk membiayai investasi pengolahan produk pertanian</p>	<p>Investasi peningkatan skala produksi mahal</p> <p>Investasi industri pengolahan membutuhkan biaya yang tinggi</p> <p>Resiko agro-industri dan agribisnis relatif tinggi</p>	<p>Pengembangan agro-industri dan agribisnis</p>	<p>Peningkatan skala produksi tidak dapat dilakukan dengan cepat</p> <p>Agroindustri dan agribisnis tidak dikembangkan dengan baik</p>
5	Persoalan kemiskinan di kelompok nelayan yang diakibatkan persoalan kemampuan menangkap ikan, permodalan dan illegal fishing	<p>Mahalnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi nelayan</p> <p>Sistem produksi yang masih bersifat tradisional</p> <p>Permodalan sulit diakses</p> <p>Lemahnya keinginan perbankan untuk berinvestasi di sektor ini</p> <p>Illegal fishing seharusnya menjadi persoalan yang harus ditangani pemerintah pusat</p> <p>Perhatian dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal</p>	<p>Perhitungan kelayakan investasi tidak tersedia</p> <p>Sumber pembiayaan tidak tersedia</p> <p>Pembiayaan perbankan di sektor ini tidak tersedia</p>	<p>Penyediaan modal dan peralatan bagi kelompok nelayan</p> <p>Budidaya perikanan darat</p> <p>Pemberdayaan usaha rumah tangga pengolahan produk perikanan</p>	<p>Penyediaan modal belum mencukupi</p> <p>Budidaya perikanan darat belum optimal</p> <p>Permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya</p> <p>Persoalan illegal fishing yang belum dapat diatasi dengan seksama</p>
6	Persoalan kemiskinan di daerah perkotaan ( <i>urban poverty</i> ) yang juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan persoalan kemiskinan di daerah pedesaan ( <i>rural poverty</i> )	<p>Persoalan-persoalan kemiskinan di daerah perkotaan belum mendapatkan perhatian yang cukup</p> <p>Perhatian dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal untuk mengatasi persoalan kemiskinan perkotaan</p>	<p>Keadaan rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang tidak memungkinkan model pemberdayaan ekonomi konvensional</p> <p>Akses permodalan yang sangat tertutup</p> <p>Kerentanan yang sangat tinggi</p>	<p>Perbaikan infrastruktur perkotaan</p> <p>Perbaikan kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>Belum tersedianya infrastruktur dasar dan penunjang di kantong-kantong kemiskinan di daerah perkotaan</p> <p>Permodalan yang belum memadai</p> <p>Kurangnya pembiayaan dari perbankan</p>

No	Persoalan Kemiskinan	Tantangan	Faktor Penghambat	Kebijakan Pro-Poor	Kesenjangan
7	Ekses kemiskinan bagi perempuan dan anak yang belum dicegah dengan baik	Sulitnya memutuskan rantai kemiskinan yang berakibat pada buruknya dampak kemiskinan bagi perempuan dan anak-anak  Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sulit dilakukan  Perhatian dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal	Masih lemahnya perhatian bagi upaya untuk mencegah eksek kemiskinan bagi perempuan dan anak-anak  Pengentasan kemiskinan tidak selalu melibatkan upaya meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta perlindungan anak	Perbaikan kualitas pendidikan bagi perempuan dan anak-anak  Permodalan bagi kelompok perempuan  Penguatan kapasitas perempuan	Kesulitan di dalam memutuskan rantai kemiskinan  Belum adanya formulasi yang jelas tentang konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8	Isu-isu perlindungan anak, seperti registrasi kelahiran, pendidikan anak usia dini, perlindungan hak-hak anak belum terlihat dengan jelas dalam radar kebijakan pro-poor yang diambil periode 2007-2011	Masih banyaknya isu-isu pemenuhan hak anak yang belum tertangani  Pemenuhan hak anak masih dianggap tanggung jawab Dinas Sosial  Tingginya kerentanan kemiskinan pada kelompok anak	Belum adanya aturan yang jelas sebagai derivasi dari Qanun Perlindungan Anak  Pemahaman yang masih belum komprehensif tentang perlindungan hak anak dalam SKPA	Registrasi kelahiran yang dipermudah dan gratis  Pencegahan pekerja anak  Pencegahan trafficking anak	Peraturan derivatif untuk menjalankan Qanun Perlindungan Anak  Kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak anak
9	Profil kemiskinan di Aceh belum terdeskripsi dengan jelas;	Belum tersedia database kemiskinan yang detail ( <i>by name, by address</i> )	Tidak tersedianya teknologi dan pendanaan yang mencukupi untuk menyusun, mengumpulkan, memvalidasi dan menerbitkan profil dan database kemiskinan di Aceh	Penyusunan database kemiskinan	Infrastruktur database belum tersedia  Kapasitas pelaksana penyusunan database tidak memadai
10	Persoalan kesehatan bagi kelompok miskin tidak hanya persoalan akses	Persoalan kualitas pelayanan kesehatan yang tidak dapat dioptimalkan melalui JKA  Persoalan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi yang spesifik dan membutuhkan perhatian ekstra  Persoalan terkait kesehatan lingkungan	GAP ketersediaan tenaga medis dengan pengguna layanan yang belum teratasi  Lemahnya pemahaman masyarakat miskin tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi  Buruknya kesadaran tentang pentingnya kesehatan lingkungan	Perluasan Akses JKA bagi ibu hamil dan bayi  Peningkatan kualitas layanan kesehatan holistik  Keterlibatan stakeholder dalam peningkatan layanan kesehatan  Perbaikan kesehatan lingkungan, penyehatan lingkungan pemukiman	Kapasitas pelayanan medis yang tidak berimbang  Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kesehatan  Pendanaan bagi JKA yang tidak berkesinambungan

### Lampiran 7 Peta Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2005



### Lampiran 8 Peta Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2006



### Lampiran 9 Peta Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2007



### Lampiran 10 Peta Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2008



## Lampiran 11 Peta Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2009



## Lampiran 12 Peta Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2010

